



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021;
- b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon dan Daerah Anggaran Sementara Tahun 2021;
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

Pasal 4

Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Juli 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311199903 1 009



SALINAN



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.5. Sistematika RKPD	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan	II-30
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-49
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-7
4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-22
4.4. Sasaran Makro Pembangunan Karanganyar Tahun 2021	IV-27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Kerja Tahun 2021	V-1
5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2021	V-19
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel II.1.	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019	II-1
Tabel II.2.	Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar	II-2
Tabel II.3.	Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS Bengawan Solo) di Wilayah Kabupaten Karanganyar	II-3
Tabel II.4.	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim	II-5
Tabel II.5.	Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019	II-5
Tabel II.6.	Luas lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ..	II-6
Tabel II.7.	Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2015-2019	II-8
Tabel II.8.	Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019	II-9
Tabel II.9.	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2015-2019	II-10
Tabel II.10.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	II-11
Tabel II.11.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2015-2019 (juta rupiah)	II-11
Tabel II.12.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019 (juta rupiah)	II-12
Tabel II.13.	Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB	II-13
Tabel II.14.	PDRB Perkapita Tahun 2015-2019	II-14
Tabel II.15.	Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional	II-16
Tabel II.16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar	II-18
Tabel II.17.	IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2015-2019	II-19
Tabel II.18.	Perkembangan Indikator Komposit IPG Tahun 2015, 2017-2019..	II-23
Tabel II.19.	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	II-24
Tabel II.20.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	II-25
Tabel II.21.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	II-25
Tabel II.22.	Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	II-26
Tabel II.23.	Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019	II-26
Tabel II.24.	Kondisi Penyakit Menular Tahun 2015-2019	II-26
Tabel II.25.	Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	II-29
Tabel II.26.	Kondisi jaringan irigasi dan embung Tahun 2015-2019	II-29
Tabel II.27.	Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2015-2019	II-30
Tabel II.28.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-31
Tabel II.29.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019	II-31
Tabel II.30.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019	II-32
Tabel II.31.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019	II-33

Tabel II.32.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	II-33
Tabel II.33.	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019	II-34
Tabel II.34.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019	II-34
Tabel II.35.	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019	II-35
Tabel II.36.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	II-35
Tabel II.37.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019	II-35
Tabel II.38.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019	II-36
Tabel II.39.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019	II-36
Tabel II.40.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019	II-37
Tabel II.41.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019	II-37
Tabel II.42.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019	II-38
Tabel II.43.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019	II-38
Tabel II.44.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019	II-38
Tabel II.45.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019	II-39
Tabel II.46.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019	II-39
Tabel II.47.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019	II-39
Tabel II.48.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019	II-40
Tabel II.49.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019	II-40
Tabel II.50.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019	II-41
Tabel II.51.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	II-41
Tabel II.52.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019	II-42
Tabel II.53.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019	II-42
Tabel II.54.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019	II-43
Tabel II.55.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019	II-44
Tabel II.56.	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019	II-45
Tabel II.57.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019	II-45
Tabel II.58.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019	II-46
Tabel II.59.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019	II-46
Tabel II.60.	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019	II-47
Tabel II.61.	Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2020	II-49
Tabel III.1.	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2021	III-2
Tabel III.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-3
Tabel III.3.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-3
Tabel III.4.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-4
Tabel III.5.	Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2015-2019	III-5

Tabel III.6.	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2015-2019	III-6
Tabel III.7.	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	III-10
Tabel III.8.	Realisasi Pendapatan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2018-2022 (*proyeksi)	III-11
Tabel III.9.	Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2022, sesuai PP 12/2019	III-11
Tabel III.10.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2018-2022	III-15
Tabel III.11.	Proyeksi 2021-2022 berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019	III-15
Tabel III.12.	Rencana Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar	III-16
Tabel III.13.	Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2022	III-17
Tabel IV.1.	Misi, Tujuan, Sasaran Dan Target Indikator Tahun 2021	IV-5
Tabel IV.2.	Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	IV-27
Tabel V.1.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2021	V-2
Tabel V.2.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021	V-2
Tabel V.3.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	V-3
Tabel V.4.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	V-3
Tabel V.5.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 ...	V-4
Tabel V.6.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 ...	V-4
Tabel V.7.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021	V-5
Tabel V.8.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	V-5
Tabel V.9.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021	V-5
Tabel V.10.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2021	V-6
Tabel V.11.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021	V-6
Tabel V.12.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	V-7
Tabel V.13.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021	V-7
Tabel V.14.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021	V-7
Tabel V.15.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2021	V-8
Tabel V.16.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	V-8
Tabel V.17.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021	V-8

Tabel V.18.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021	V-9
Tabel V.19.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021	V-9
Tabel V.20.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2021	V-9
Tabel V.21.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2021	V-9
Tabel V.22.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021	V-10
Tabel V.23.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2021	V-10
Tabel V.24.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2021	V-10
Tabel V.25.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	V-11
Tabel V.26.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2021	V-11
Tabel V.27.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2021	V-11
Tabel V.28.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2021	V-12
Tabel V.29.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	V-12
Tabel V.30.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2021	V-12
Tabel V.31.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2021	V-13
Tabel V.32.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2021	V-13
Tabel V.33.	Program dan Perkiraan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2021	V-13
Tabel V.34.	Program dan Perkiraan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2021	V-14
Tabel V.35.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2021	V-14
Tabel V.36.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2021	V-14
Tabel V.37.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2021	V-15
Tabel V.38.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	V-15
Tabel V.39.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	V-15
Tabel V.40.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2021	V-15
Tabel V.41.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kewilayahan Tahun 2021	V-16
Tabel V.42.	Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021	V-19
Tabel V.43.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021	V-19

Tabel VI.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	VI.2
Tabel VI.2	Penetapan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VI.4

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1.	Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar II-2
Gambar 2.2.	Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar II-4
Gambar 2.3.	Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar II-5
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019 II-10
Gambar 2.5.	Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 2015-2019 II-14
Gambar 2.6.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 II-15
Gambar 2.7.	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-15
Gambar 2.8.	Persentase Kemiskinan Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 II-16
Gambar 2.9.	Garis Kemiskinan Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 II-17
Gambar 2.10.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 II-17
Gambar 2.11.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 II-18
Gambar 2.12.	Nilai IPM Wilayah Soloraya Tahun 2015-2019 II-19
Gambar 2.13.	Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 II-19
Gambar 2.14.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 II-20
Gambar 2.15.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 II-21
Gambar 2.16.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 II-21
Gambar 2.17.	Pengeluaran Per Kapita Kab. Karanganyar dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2015-2019 II-22
Gambar 2.18.	Perkembangan IPG Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019 II-22
Gambar 2.19.	Perkembangan IDG Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 II-24
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karanganyar, Prov Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019 III-5
Gambar 3.2.	Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 2015-2019 III-6
Gambar 4.1.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 IV-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2021 tahun ke III periode lima tahunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Rencana pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 memperhatikan RPJMD Tahun 2018-2023, pada Tahun 2021 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dengan tema ***"Maju dan Berdaya Saing"*** dan arah pembangunan ***"Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur"***. Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2019-2020, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review rencana tata ruang dan wilayah; prinsip (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2016-2030; dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagai berikut :

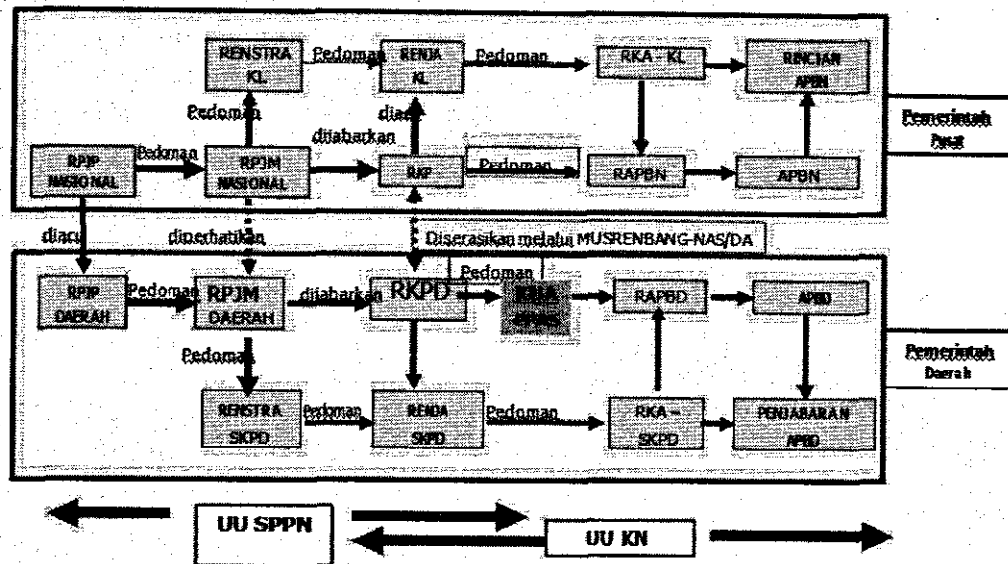
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104).

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD. RPJPD menjelaskan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) .



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1: Keterkaitan RKPd dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagai rencana tahunan, mendasarkan pada dokumen RPJMD tahun 2018–2023, arahan kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2021, dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, RTRW Provinsi Jawa Tengah, Prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2016-2030, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS). Indikator SPM di 6 urusan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 akan dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam peraturan menteri dimasing masing urusan. Sehingga RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional Tahun 2021, dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan secara nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2021.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 adalah :

1. Tersedianya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;
3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 disusun berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang meliputi :

- pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen perencanaan pembangunan serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang memuat ketentuan / peraturan perundang-undangan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.
- Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.
- Tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
- Sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bagian ini menjelaskan secara logis tentang :

- Gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
- Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa, 1.961 Rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan terbesar yang mencapai luas sebesar 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.

Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

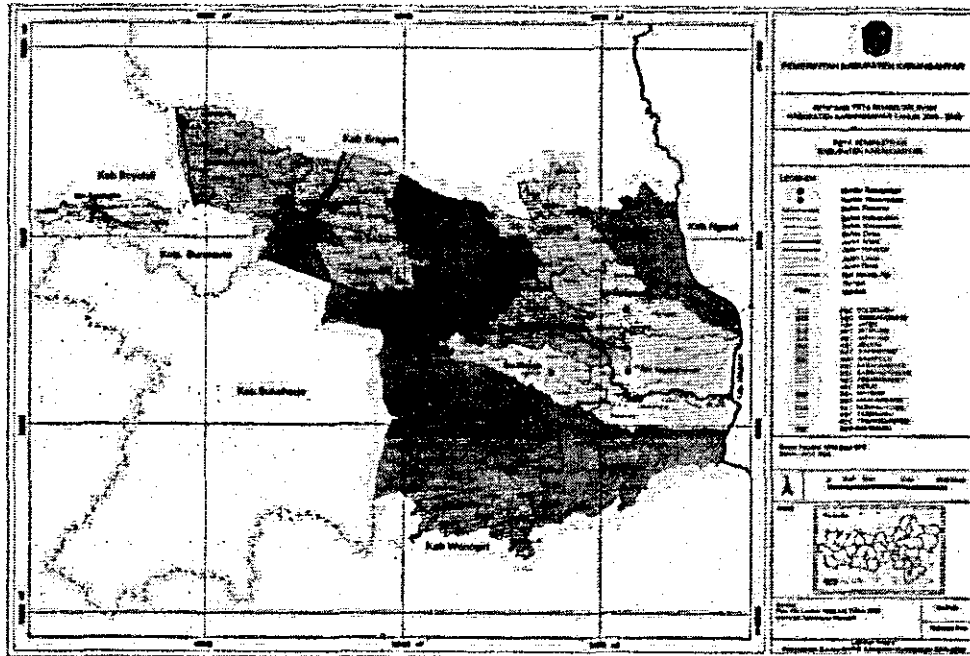
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa
1.	Jatipuro	4.036,50	0	10
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9
3.	Jumapolo	5.567,02	0	12
4.	Jumatono	5.355,44	0	11
5.	Matesih	2.626,63	0	9
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10
11.	Jaten	2.554,81	0	8
12.	Colomadu	1.564,17	0	11
13.	Gondagrejo	5.679,95	0	13
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13
16.	Kerjo	4.682,27	0	10
17.	Jenawi	5.608,28	0	9
Total		77.378,64	15	162

Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar, yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo sedangkan untuk luas wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Colomadu.

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi
Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan
Kota Surakarta



Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl.

Tabel II.2.
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kab. Karanganyar		80	2.000	511

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2020,

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3. Saat ini air, baik air permukaan maupun bawah tanah, semakin membutuhkan perhatian, karena jangka panjang dapat menimbulkan perselisihan antar komponen masyarakat. Kebutuhan untuk air bersih (PDAM), kebutuhan untuk irigasi dan kebutuhan usaha pribadi (privatisasi air/mata air).

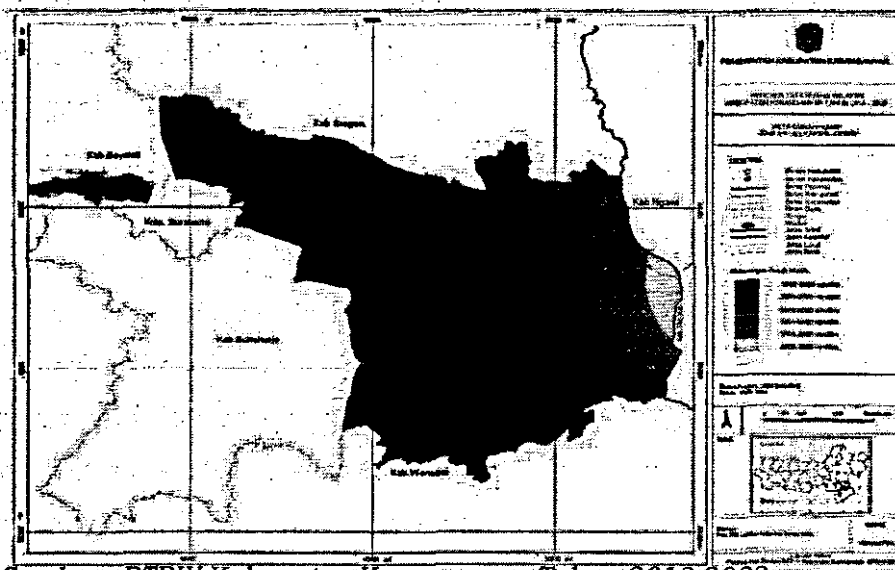
Tabel II.3.
Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS Bengawan Solo) di Wilayah
Kabupaten Karanganyar

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M ³ /detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah - Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : DPUPR, 2019

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah sebanyak 210 hari dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebanyak 26 hari hujan, sedangkan yang terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7 hari hujan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 8.390 mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 2.062 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu sebesar 162 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.



Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.2.
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2019 adalah 77.379 Ha, terdiri tanah sawah 23.107 Ha, pertanian bukan sawah sebesar 29.795 Ha dan bukan lahan pertanian 24.477 Ha. Tanah sawah terdiri dari dari irigasi teknis 20.419 Ha, sedangkan sawah tidak berpengairan/ non irigasi sebesar 2.688 Ha.

Tabel II.6.
Luas lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Jatipuro	4.036,50
2.	Jatiyoso	6.716,49
3.	Jumapolo	5.567,02
4.	Jumantono	5.355,44
5.	Matesih	2.626,63
6.	Tawangmangu	7.003,16
7.	Ngargoyoso	6.533,94
8.	Karangpandan	3.411,08
9.	Karanganyar	4.302,64
10.	Tasikmadu	2.759,73
11.	Jaten	2.554,81
12.	Colomadu	1.564,17
13.	Gondangrejo	5.679,95
14.	Kebakramat	3.645,63
15.	Mojogedang	5.330,90
16.	Kerjo	4.682,27
17.	Jenawi	5.608,28
	Total	77.378,64

Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka, 2020

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, pola ruang kabupaten meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan lindung Kabupaten Karanganyar meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan konservasi, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan Lindung geologi dan Kawasan cagar budaya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung yang memiliki luas kurang lebih 6.808 (enam ribu delapan ratus delapan)hektar, meliputi Kecamatan Tawangmangu; Kecamatan Ngargoyoso; Kecamatan Jenawi; Kecamatan Jatiyoso; Kecamatan Matesih; Kecamatan Jatipuro. Kawasan resapan air adalah kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar

Boyolali seluas 49.140 (empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh) hektar, meliputi Kecamatan Tawangmangu; Kecamatan Jenawi; Kecamatan Nargoyoso; Kecamatan Jatiyoso; Kecamatan Kerjo; Kecamatan Karangpandan; Kecamatan Matesih; Kecamatan Jatipuro; Kecamatan Jumapolo; Kecamatan Jumantono; Kecamatan Karanganyar; dan Kecamatan Mojogedang.

Kawasan perlindungan setempat meliputi : Kawasan sempadan sungai; Kawasan sekitar danau atau waduk; RTH Perkotaan; dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal, yaitu :

- a). Kawasan sempadan sungai, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 4.397 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi Kecamatan Colomadu; Kecamatan Gondangrejo; Kecamatan Jaten; Kecamatan Jatipuro; Kecamatan Jatiyoso; Kecamatan Jenawi; Kecamatan Jumantono; Kecamatan Jumapolo; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangpandan; Kecamatan Kebakkramat; Kecamatan Kerjo; Kecamatan Matesih; Kecamatan Mojogedang; Kecamatan Nargoyoso; Kecamatan Tasikmadu; dan Kecamatan Tawangmangu.
- b). Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, meliputi waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar; waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar; waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso; . waduk Gondang di Kecamatan Kerjo; dan e. waduk Gemantar di Kecamatan Jumantono.
- c). RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi RTH privat dan RTH publik. Proporsi RTH privat sebagaimana dimaksud pada , paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan. Proporsi RTH publik, paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan yaitu kurang lebih 1.309 (Seribu tiga ratus sembilan) hektar. RTH privat meliputi RTH pekarangan; RTH taman dan Hutan kota; RTH jalur hijau Jalan; dan RTH fungsi tertentu. RTH publik , terdiri atas; RTH taman dan Hutan kota; RTH jalur hijau Jalan; dan RTH fungsi tertentu.
- d). Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal memiliki luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar, meliputi : Candi Sுகuh di Kecamatan Nargoyoso; Candi Cetho di Kecamatan Jenawi; Masjid Karanganyar di Kecamatan Karanganyar; Masjid Jami' di Kecamatan Tasikmadu; dan Makam Raja-Raja Surakarta di Kecamatan Matesih.

Kawasan konservasi berupa Kawasan pelestarian alam yang meliputi Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu, dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar terdapat di Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu,

Kecamatan Tawangmangu. Taman Hutan Raya yaitu Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A. Mangkunegoro I di Ngargoyoso dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar terdapat di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

Kawasan rawan bencana alam meliputi: Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan Kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas 1.426 (seribu empat ratus dua puluh enam) hektar, meliputi Kecamatan Jenawi; Kecamatan Ngargoyoso; Kecamatan Tawangmangu; Kecamatan Jatiyoso; Kecamatan Jumapolo; Kecamatan Jumantono; Kecamatan Jatipuro; Kecamatan Karangpandan; Kecamatan Matesih; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kerjo; Kecamatan Kebakkramat; Kecamatan Gondangrejo; dan Kecamatan Mojogedang. Kawasan rawan bencana banjir merupakan Kawasan yang terdampak dari backwater Sungai Bengawan Solo, meliputi Kecamatan Jaten; Kecamatan Kebakkramat; dan Kecamatan Gondangrejo.

Kawasan Lindung geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi; dan sempadan mata air. Kawasan cagar alam geologi memiliki luas kurang lebih 1 (satu) hektar, meliputi Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih; Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso; Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu. Sempadan mata air berupa Kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Tawangmangu; Kecamatan Matesih; Kecamatan Karangpandan; Kecamatan Ngargoyoso; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Jumapolo; Kecamatan Jatipuro; Kecamatan Jatiyoso; Kecamatan Gondangrejo; Kecamatan Mojogedang; Kecamatan Kebakkramat; dan Kecamatan Jumantono.

Kawasan cagar budaya memiliki luas kurang lebih 2.392 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar, meliputi Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu; dan Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2019 sebanyak 886.519 jiwa, sedangkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2015- sampai 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.7.

Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jatipuro	28.466	28.268	28.892	29.096	29.004
2.	Jatiyoso	36.500	36.147	37.074	37.349	37.089
3.	Jumapolo	35.661	35.429	36.210	36.474	36.351
4.	Jumantono	42.450	41.852	43.117	43.437	42.939
5.	Matesih	40.452	39.950	41.099	41.408	40.994
6.	Tawangmangu	44.542	44.444	45.262	45.607	45.598

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Ngargoyoso	32.622	32.372	33.145	33.397	33.213
8.	Karangpandan	39.762	39.382	40.402	40.707	40.409
9.	Karanganyar	78.613	79.550	79.913	80.538	81.629
10.	Tasikmadu	59.011	59.903	59.995	60.468	61.461
11.	Jaten	82.352	83.414	83.717	84.371	85.583
12.	Colomadu	74.778	80.110	76.113	76.757	82.199
13.	Gondangrejo	76.705	79.052	78.004	78.628	81.112
14.	Kebakramat	61.728	62.448	62.744	63.232	64.075
15.	Mojogedang	61.149	61.616	62.151	62.632	63.217
16.	Kerjo	34.489	34.078	35.040	35.304	34.963
17.	Jenawi	25.925	26.006	26.342	26.541	26.683
	Total	855.207	864.021	869.220	875.946	886.519

Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka, 2017, 2019, 2020

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2019 yaitu Kecamatan Jaten dengan jumlah penduduk sebanyak 85.583 jiwa, sementara Kecamatan Jumapolo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 6.351 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar sebesar 1.145,69 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 5.255,12 jiwa/ km², sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Jenawi dengan kepadatan sebesar 475,78 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel II.8.
Pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jatipuro	1,80%	-0,70%	2,21%	0,71%	-0,32%
2.	Jatiyoso	2,06%	-0,97%	2,56%	0,74%	-0,70%
3.	Jumapolo	1,75%	-0,65%	2,20%	0,73%	-0,34%
4.	Jumantono	2,51%	-1,41%	3,02%	0,74%	-1,15%
5.	Matesih	2,37%	-1,24%	2,88%	0,75%	-1,00%
6.	Tawangmangu	1,62%	-0,22%	1,84%	0,76%	-0,02%
7.	Ngargoyoso	2,03%	-0,77%	2,39%	0,76%	-0,55%
8.	Karangpandan	2,22%	-0,96%	2,59%	0,75%	-0,73%
9.	Karanganyar	0,76%	1,19%	0,46%	0,78%	1,35%
10.	Tasikmadu	0,60%	1,51%	0,15%	0,79%	1,64%
11.	Jaten	0,68%	1,29%	0,36%	0,78%	1,44%
12.	Colomadu	-3,14%	7,13%	-4,99%	0,85%	7,09%
13.	Gondangrejo	-0,62%	3,06%	-1,33%	0,80%	3,16%
14.	Kebakramat	0,65%	1,17%	0,47%	0,78%	1,33%
15.	Mojogedang	0,95%	0,76%	0,87%	0,77%	0,93%
16.	Kerjo	2,34%	-1,19%	2,82%	0,75%	-0,97%
17.	Jenawi	1,37%	0,31%	1,29%	0,76%	0,54%
	Total	0,80%	1,03%	0,60%	0,77%	1,21%

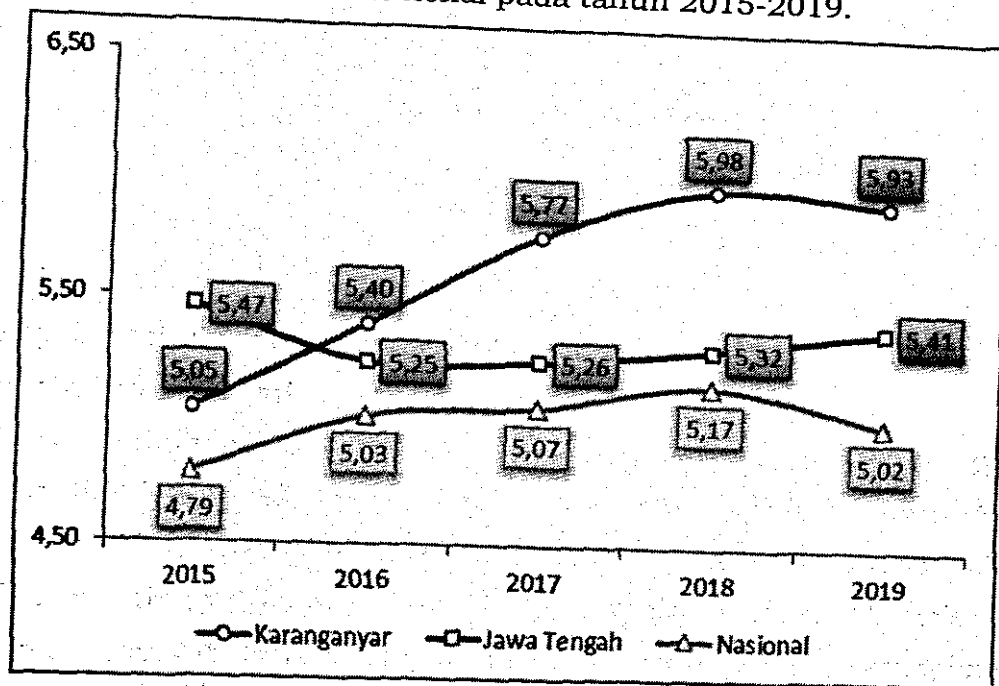
Sumber: Baperlitbang, 2020 diolah.

Tampak bahwa pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang tercepat selama periode 5 tahun terakhir 1,21%, sedangkan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun adalah 0,88%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebesar 5,93%, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2015-2019.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Gambar 2.4.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 5,05 % pada tahun 2015 menjadi 5,93 % pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya / kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2019 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 berada di peringkat 2 setelah Kabupaten Boyolali. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.9.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten
Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Boyolali	5,96	5,33	5,80	5,72	5,96
2	Klaten	5,30	5,17	5,33	5,57	5,57
3	Sukoharjo	5,69	5,72	5,76	5,82	5,92

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Wonogiri	5,40	5,25	5,32	5,41	5,14
5	Karanganyar	5,05	5,40	5,77	5,98	5,93
6	Sragen	6,05	5,77	5,97	5,75	5,90
7	Surakarta	5,44	5,35	5,70	5,75	5,78
8	Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,32	5,41
9	Nasional	4,79	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

b. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2015-2019 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu mengalami pertumbuhan yang positif, tahun 2019 sebesar Rp. 37.013.093,96 (juta rupiah) meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 26.904.049,89 (juta rupiah) Hal yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2019 sebesar Rp. 26.641.186,38 (juta rupiah) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 21.286.287,14 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.10.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%
2018	34.287.872,56	8,72%	25.150.277,73	5,98%
2019	37.013.093,96	7,95%	26.641.186,38	5,93%

Sumber : Kab. Karanganyar Dalam Angka 2020, BPS

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB tahun 2015-2019.

Tabel II.11.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91	4.612.407,76	4.774.413,19
2. Pertambangan dan Penggalian	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56	412.137,54

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
3. Industri Pengolahan	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97	17.028.889,02
4. Listrik, Gas dan Air Minum	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48	55.837,73
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90	24.036,59
6. Konstruksi	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83	2.662.576,89
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67	4.192.542,89
8. Transportasi dan Pergudangan	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52	892.326,71
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31	1.207.963,31
10. Informasi dan Komunikasi	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52	457.262,77
11. Jasa Keuangan	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76	1.315.872,27
12. Real Estate	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77	629.622,08
13. Jasa Perusahaan	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33	147.441,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30	687.212,66
15. Jasa Pendidikan	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76	1.665.173,08
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07	309.739,85
17. Jasa lainnya	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05	550.046,11
PDRB	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	34.287.872,56	37.013.093,96

Sumber : Kab. Karanganyar Dalam Angka 2020, BPS

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK tahun 2015-2019.

Tabel II.12.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.797,36	3.255.968,59
2. Pertambangan dan Penggalian	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13	260.966,08
3. Industri Pengolahan	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08	12.177.776,57
4. Listrik, Gas dan Air Minum	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,80	45.807,19
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68	20.983,30
6. Konstruksi	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48	1.705.066,84	1.839.116,77
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02	3.249.326,57
8. Transportasi dan Pergudangan	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.198,07	748.376,94
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	697.279,26	732.397,77	771.278,70	828.695,17	905.378,27

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
10. Informasi dan Komunikasi	315.512,46	338.040,05	365.995,96	427.715,42	477.490,46
11. Jasa Keuangan	705.929,31	760.048,58	819.720,53	888.659,50	895.221,22
12. Real Estate	403.183,16	426.366,19	451.138,07	476.205,55	504.126,34
13. Jasa Perusahaan	70.905,07	77.414,16	84.954,29	93.988,31	104.087,38
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	441.204,73	450.205,31	459.929,74	469.542,27	479.673,45
15. Jasa Pendidikan	803.580,33	803.580,33	908.533,43	973.744,20	1.032.341,60
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.531,82	164.531,82	189.245,46	205.912,76	219.428,19
17. Jasa lainnya	314.442,75	314.442,75	350.478,69	384.464,47	425.117,46
PDRB	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05	25.150.317,63	26.641.186,38

Sumber : Kab. Karanganyar Dalam Angka 2020, BPS.

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015-2019, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

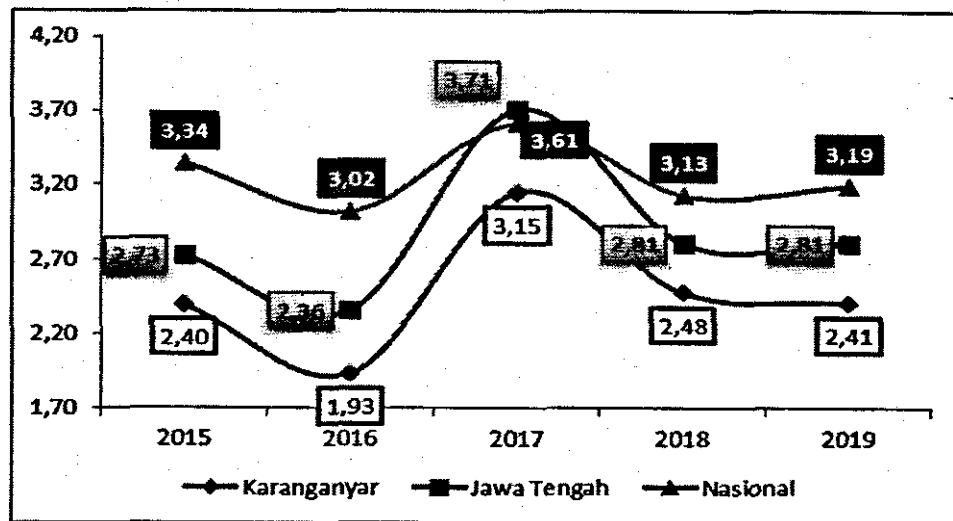
Tabel II.13.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,89	14,31	13,51	13,45	12,90
2. Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,24	1,22	1,22	1,11
3. Industri Pengolahan	45,21	45,78	45,89	45,68	46,01
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,06	0,06
6. Konstruksi	6,37	6,39	6,58	6,97	7,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	11,06	11,20	11,15	11,33
8. Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,48	2,60	2,41	2,41
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,27	3,33	3,33	3,19	3,26
10. Informasi dan Komunikasi	1,06	1,05	1,09	1,18	1,24
11. Jasa Keuangan	3,41	3,47	3,62	3,75	3,56
12. Real Estate	1,74	1,71	1,71	1,71	1,70
13. Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,10	2,08	2,02	1,93	1,86
15. Jasa Pendidikan	4,27	4,30	4,39	4,46	4,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84
17. Jasa lainnya	1,41	1,42	1,41	1,45	1,49
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2019

c. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2015-2019) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,40% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,41%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.5.

Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 2015-2019

d. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 39.004,36 atau naik sebesar 6,97% dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan sebesar 5,37%.

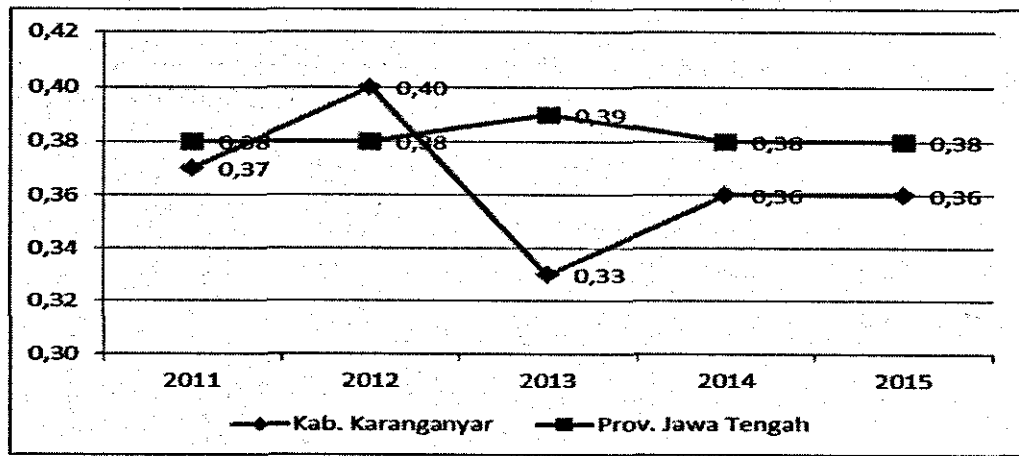
Tabel II.14.
PDRB Perkapita Tahun 2015-2019

Tahun	ADHB (Ribu Rupiah)	ADHK 2010 (Ribu Rupiah)
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152
2018	39.009	28.609
2019	41.751	30.052

Sumber : Kab. Karanganyar Dalam Angka 2020, BPS

e. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,40 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,36. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan/ pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi ketimpangan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

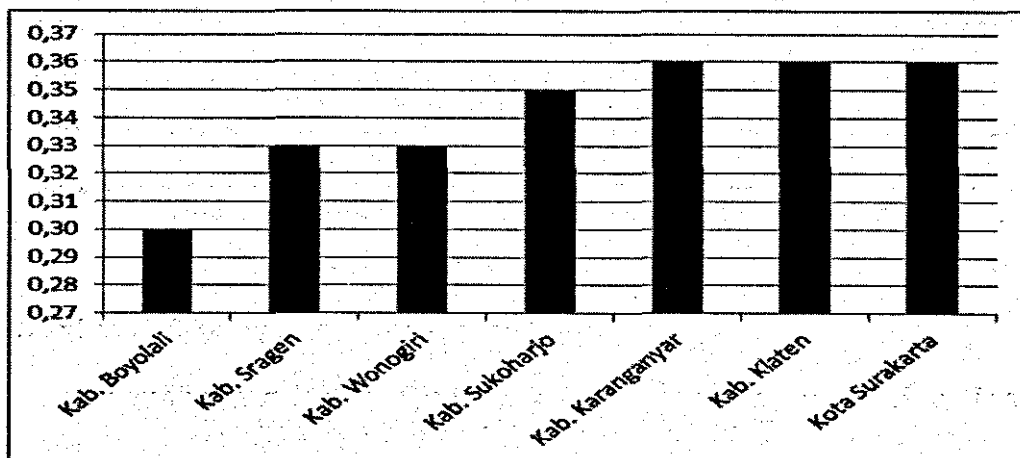


Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar 2.6.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 0,36 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi kelima.



Sumber: BPS ProSumber BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.7.

Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

f. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebanyak 106,40 ribu jiwa (12,49%), dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 84,50 ribu jiwa (9,55%). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

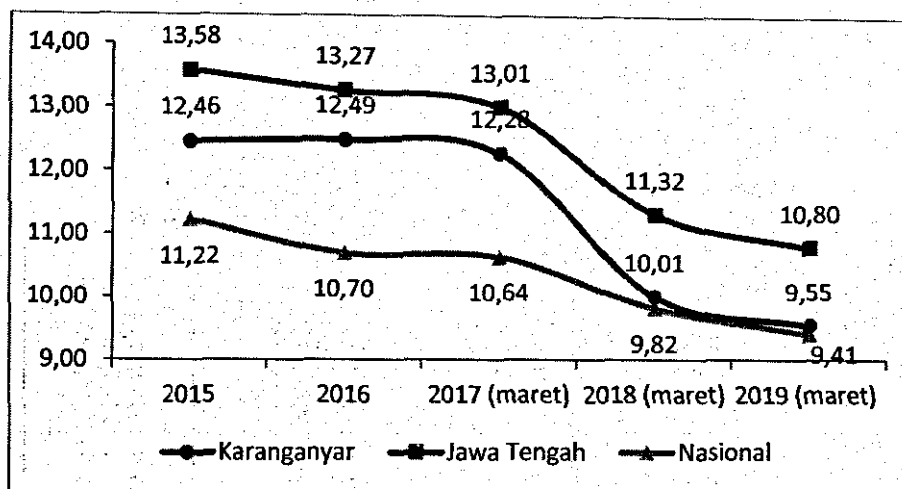
Tabel II.15.

Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Kab. Karanganyar		Jawa Tengah	Nasional
	(Ribu Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2015	106,40	12,49	13,32	11,13
2016	107,70	12,49	13,19	10,70
2017	106,80	12,28	12,23	10,12
2018	87,79	10,01	11,19	9,82
2019	84,50	9,55	10,80	9,41

Sumber : BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah tapi masih di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

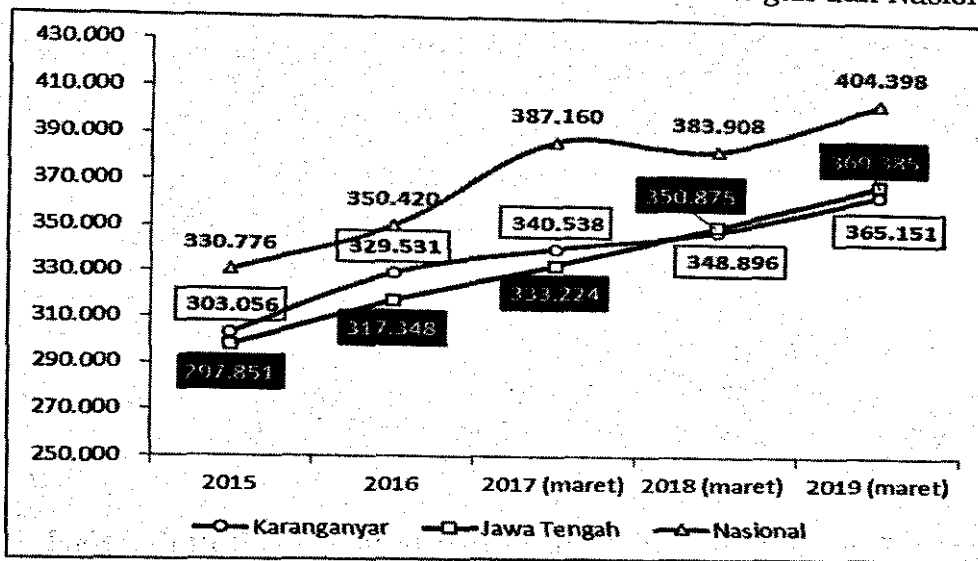
Gambar 2.8.

Persentase Kemiskinan Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019.

Jumlah penduduk miskin akan meningkat karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena banyaknya PHK, selain itu bagi para pencari kerja akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, Dampak lain yaitu turunnya omzet dari pelaku usaha yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dengan cara memberikan stimulus pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Pada tahun 2019 (maret) garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.365.151 kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2015, yaitu Rp.303.056 kapita/bulan. Kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar selaras dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

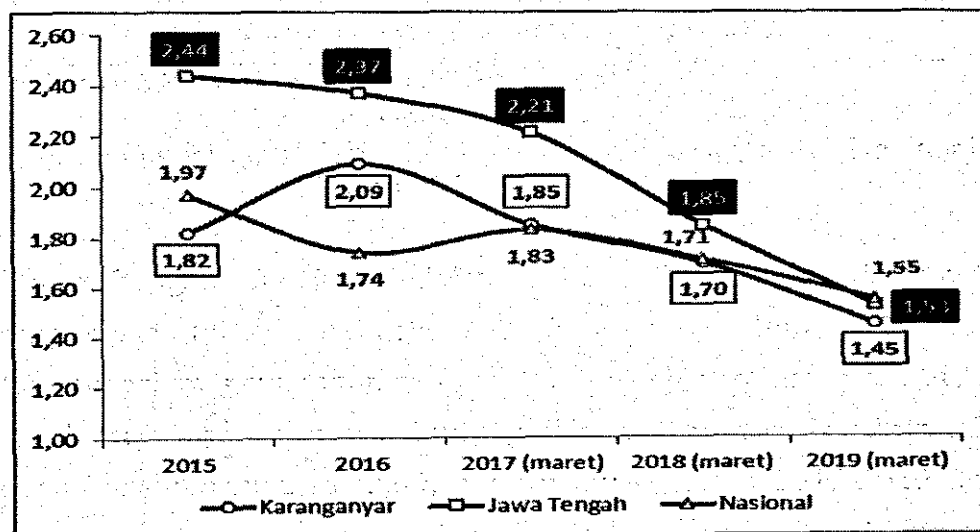


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Gambar 2.9.

Garis Kemiskinan Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 1,82 dan pada tahun 2019 sebesar 1,45 atau mengalami penurunan sebesar 20,33 %. Selama kurun waktu lima tahun telah terjadi penurunan cukup signifikan, namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2,09, namun mulai tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan. Kondisi Kedalaman Ekonomi (P1) Kabupaten Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P1 Jawa Tengah dan Nasional.

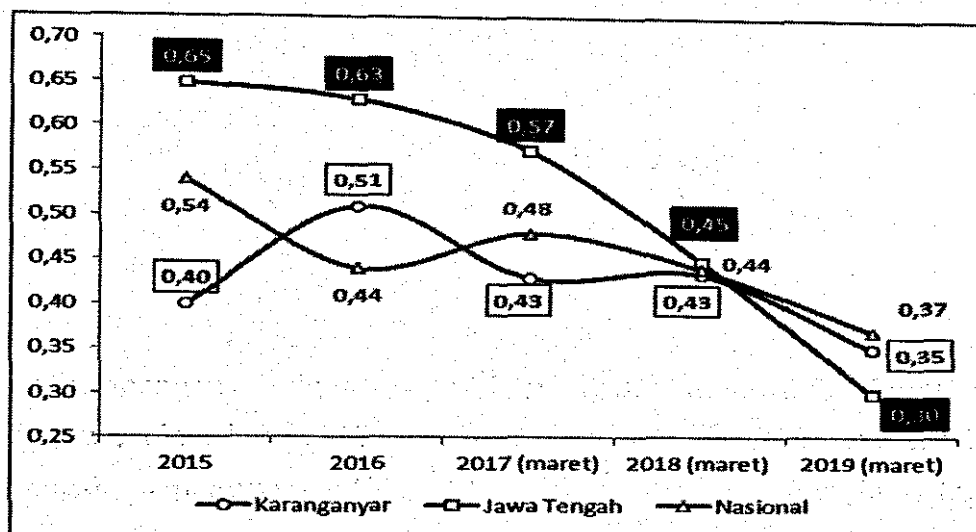


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Gambar 2.10.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 0,40 dan tahun 2019 sebesar 0,35 atau mengalami penurunan (12,50%). Selama kurun waktu lima tahun tersebut terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,51 atau naik sebesar 0,11 (27,50%) dari tahun 2015. Kondisi P2 Kabupaten Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P2 Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Gambar 2.11.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,20 %, yaitu dari 74,26 (tahun 2014) menjadi 75,89 (tahun 2019).

Tabel II.16.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar

Komponen	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka harapan hidup saat lahir (AHL)	Tahun	77,11	77,11	77,31	77,36	77,38
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,27	13,64	13,65	13,66	13,67
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10.486,00	10.722,00	10.933,00	11.223,00	11.569,00
IPM	Angka	74,26	74,90	75,22	75,54	75,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

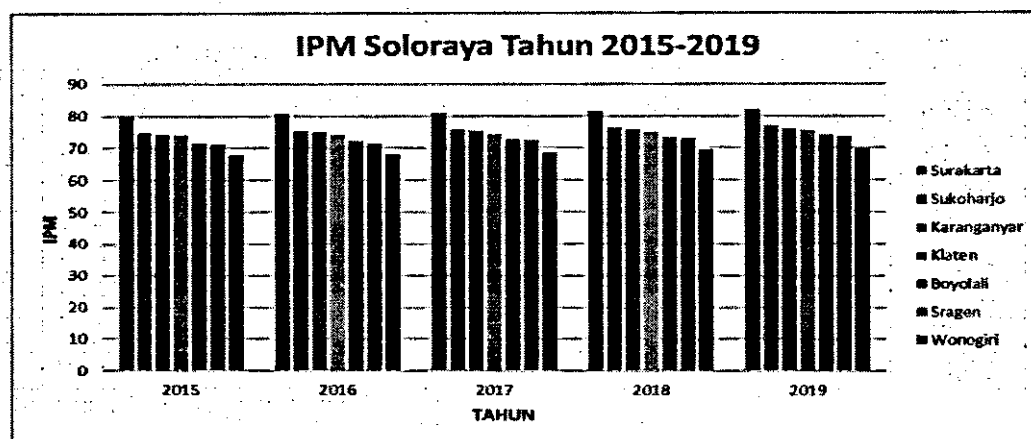
Adapun IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.17.
IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Surakarta	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
2.	Sukoharjo	74,53	75,06	75,56	76,07	76,84
3.	Karanganyar	74,26	74,90	75,22	75,54	75,89
4.	Klaten	73,81	73,97	74,25	74,79	75,29
5.	Boyolali	71,74	72,18	72,64	73,22	73,80
6.	Sragen	71,10	71,43	72,40	72,96	73,43
7.	Wonogiri	67,76	68,23	68,66	69,37	69,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

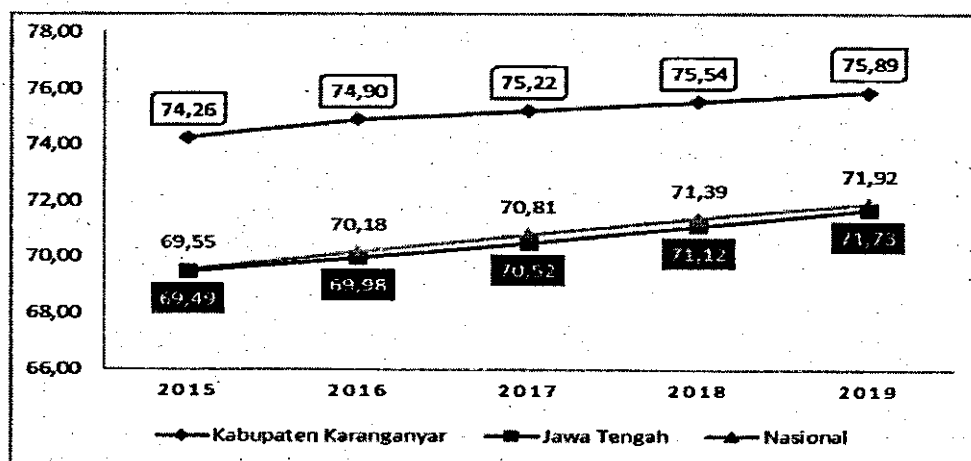
Nilai IPM Kabupaten/Kota wilayah Soloraya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan nilai IPM. Nilai IPM Kabupaten/Kota Soloraya pada tertinggi di Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen dan yang terkecil Kabupaten Wonogiri.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.12.
Nilai IPM Wilayah Soloraya Tahun 2015-2019

IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2019 sebesar 75,89 di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 71,73 dan juga nasional sebesar 71,92.



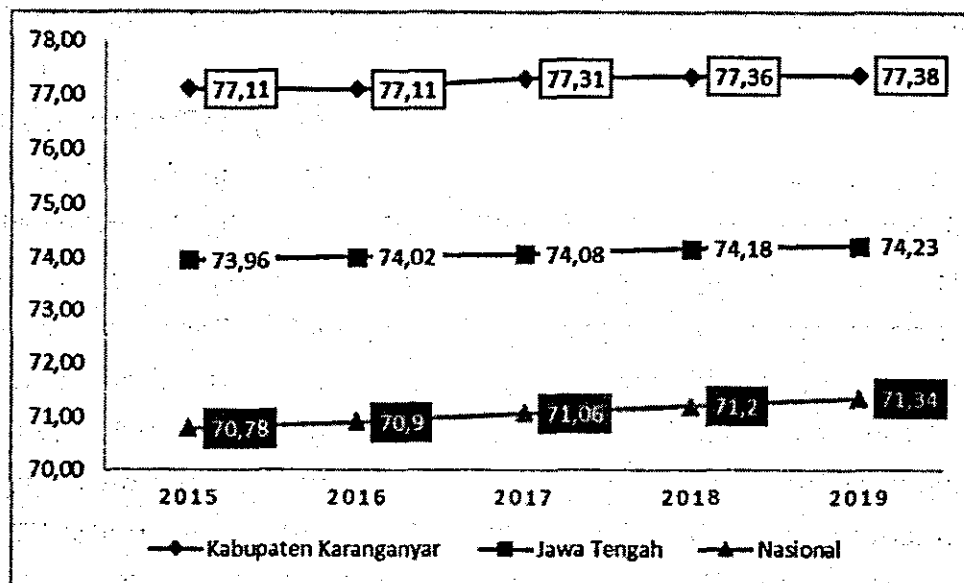
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.13.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik dari 77,11 pada tahun 2015 menjadi 77,38 pada tahun 2019, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, AHH Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 74,23 dan Nasional sebesar 71,34



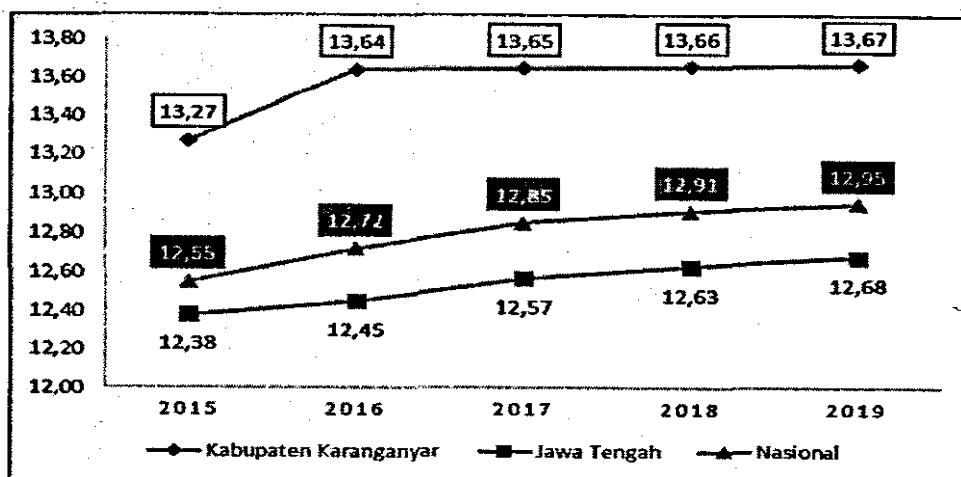
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.14.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari sebesar 13,27 (tahun 2015) menjadi 13,67 (tahun 2019). Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 12,68 dan Nasional sebesar 12,95.



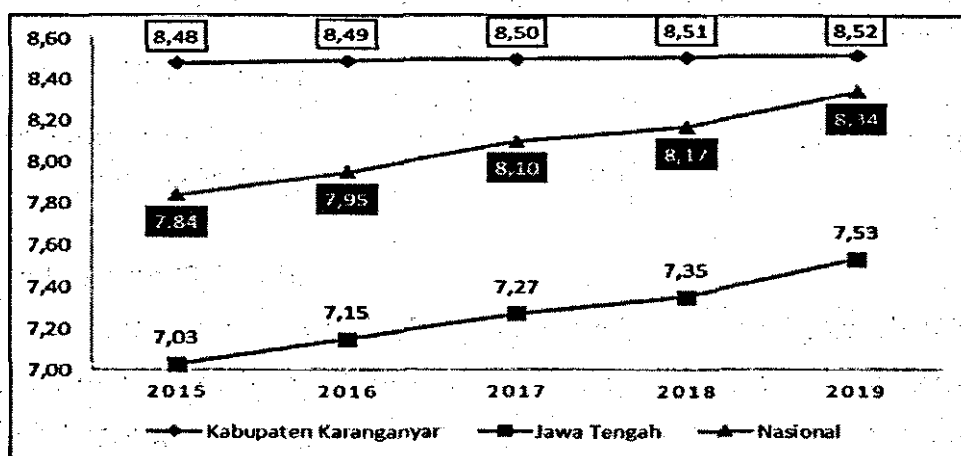
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.15.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

3) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2015-2019 meningkat dari 8,48 tahun 2015 menjadi 8,52 tahun 2019. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

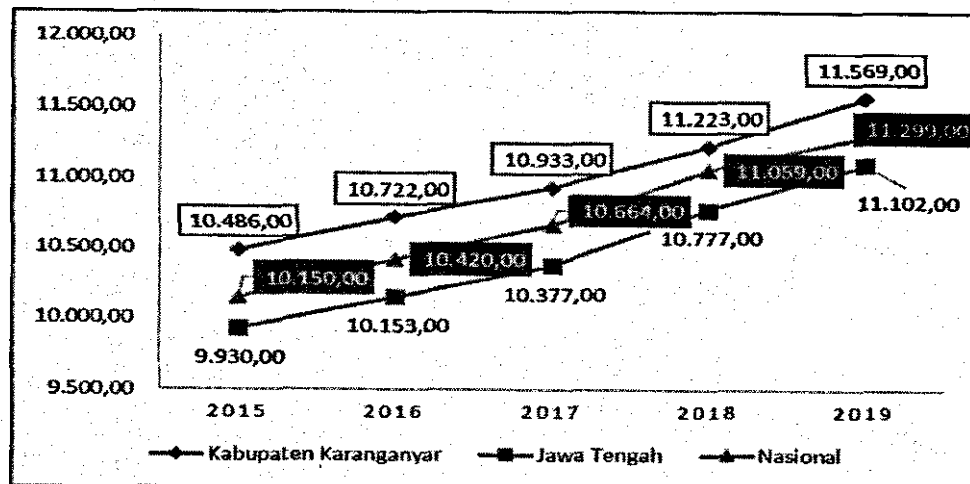
Gambar 2.16.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

4) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.486,00 ribu pada tahun 2015 menjadi Rp. 11.569,00 ribu pada tahun 2019, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk

Karanganyar mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut.



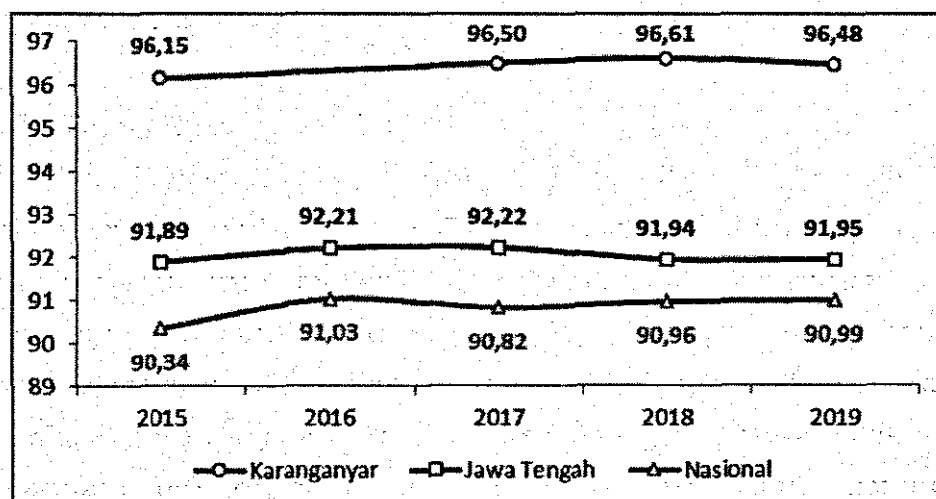
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.17.

Pengeluaran Per Kapita Kab. Karanganyar dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2015-2019

5) Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015 hingga tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 nilai IPG Kabupaten Karanganyar mencapai 96,15 kemudian pada tahun 2019 menjadi 96,48.



Sumber : BPS Nasional, 2020

Gambar 2.18.

Perkembangan IPG Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019

Indikator komposit IPG hampir sama dengan indikator komposit IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan, namun dalam IPG indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya. Pada tahun 2019 capaian AHH perempuan sebesar 79,23 tahun lebih tinggi dibandingkan AHH laki laki sebesar 75,59 tahun. Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada indikator HLS tahun 2019, capaian perempuan sebesar 13,75 tahun lebih rendah dari capaian laki-laki sebesar 13,32 tahun, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara 2 (dua) indikator lainnya, yaitu RLS dan Sumbangan Pendapatan, capaian perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi RLS dan Sumbangan Pendapatan antara laki-laki dan perempuan tersebut juga dialami pada tahun-tahun sebelumnya. Khususnya pada indikator sumbangan pendapatan dapat dipengaruhi akibat kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

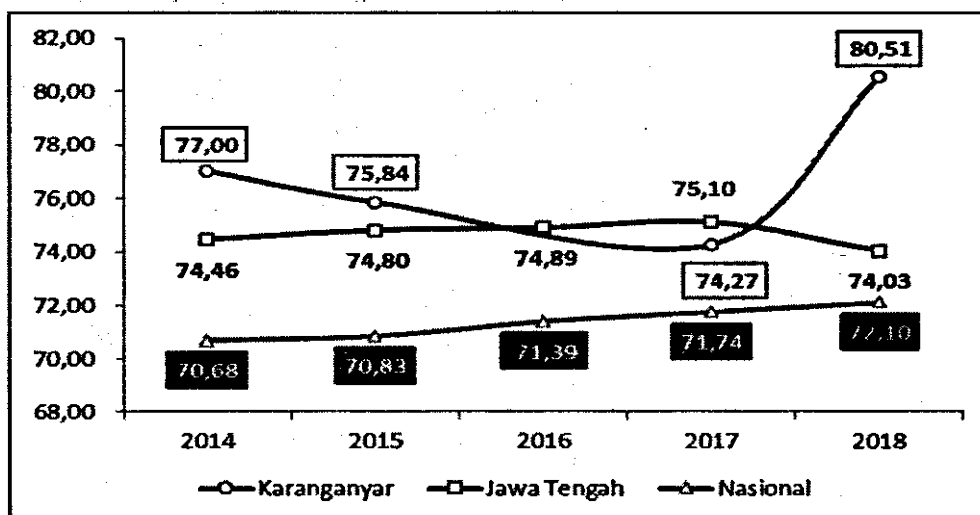
Tabel II.18.
Perkembangan Indikator Komposit IPG Tahun 2015, 2017-2019

No	Indikator	2015		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,08	79,03	75,53	79,16	75,58	79,21	75,59	79,23
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,26	13,32	13,30	13,73	13,31	13,74	13,32	13,75
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,28	7,72	9,3	7,74	9,31	7,91	9,32	7,93
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	10.922	10.369	11.399	10.800	11.692	10.947	12.124	11.217

Sumber : BPS Nasional, 2020

6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 77,00 pada tahun 2014 menurun menjadi 75,84 pada tahun 2015, pada tahun 2017 capaian IDG Kabupaten Karanganyar kembali turun menjadi 74,22 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 80,51.



Sumber : BPS Nasional, 2020

Gambar 2.19.

Perkembangan IDG Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2015-2019, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.19.

Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	24,44	22,22	22,22	22,22	28,89
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	56,72	47,03	47,03	38,69	49,22
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	37,76	38,10	38,10	38,11	38,13

Sumber : BPS Nasional, 2020

7) Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 adalah 42,01 per 100.000 KH, angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 88,58 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan preeklamsi serta infeksi kehamilan/sepsis. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.20.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2015	77,58	111,16
2016	72,60	109,65
2017	42,01	88,58
2018	42,01	Na
2019	49,20	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2020

8) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, dimana AKB pada tahun 2013 sebesar 10,50 per 1.000 KH, dan tahun 2018 sebesar 8,15 per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 8,93 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspekasi serta penyakit konginetal. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.21.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2015	13,96	10,00
2016	12,41	9,99
2017	8,51	8,93
2018	8,15	Na
2019	8,36	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2020

Angka kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan berobat.

9) Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai

usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelainan konginetal. AKABA di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan cenderung meningkat. Namun demikian capaiannya masih lebih baik dari AKABA Provinsi Jateng, walaupun demikian kita perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sebab seberapapun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan.

Tabel II.22.
Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	Kab. Karanganyar	Prov. Jawa Tengah
2015	2,17	11,64
2016	1,84	11,80
2017	1,00	10,47
2018	0,25	Na
2019	0,31	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar 2020

10) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Di Kabupaten Karanganyar, prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan peningkatan kewaspadaan. Namun demikian prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang di tetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.23.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi (%)	0,040	0,025	0,030	0,030	0,030

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2020

11) Penyakit Menular

Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.24.
Kondisi Penyakit Menular Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Angka Penemuan kasus TB Paru (%)	57,80	64,73	74,50	74,50	33
2. Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	100	100	137	137	100

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
3. Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	57,0	15,2	8,3	8,52	9,25
4. Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk)	11	3	1	1	0,002

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2020

Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kab. Karanganyar tahun 2015-2019 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan, namun demikian masih perlu diwaspasai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan TB dan HIV AIDS merefleksikan kebiasaan perilaku sehat dimasyarakat perlu menjadi perhatian lebih.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum, dibedakan ke dalam Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Penunjang Pemerintah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup (1) Tenaga kerja; (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan hidup; (6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa; (7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) Perhubungan; (9) Komunikasi dan informatika; (10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; (11) Penanaman modal; (12) kepemudaan dan olah raga; (13) statistik; (14) persandian; (17) kebudayaan; (18) perpustakaan; (19) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan mencakup (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) perdagangan; (5) perindustrian; (6) transmigrasi. Urusan Penunjang Pemerintah mencakup (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan pengembangan; (6) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Kabupaten Karanganyar fungsi (6) dipecah menjadi (1) pengawasan dan (2) administrasi pemerintahan. Hasil capaian Tahun 2019 dari masing-masing urusan dijelaskan lebih rinci pada subbab 2.2.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *European Commission* memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam *Regional Competitiveness Index (RCI)* didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah.

a. Institusi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara institusi merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini ditunjukkan dengan adanya prestasi dibidang pengelolaan pemerintahan, yaitu opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan 2019. Pencapaian prestasi ini didukung dengan penilaian SAKIP yang semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, dan B pada tahun 2017 dan 2018, dan penghargaan juara nasional dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) dan penghargaan Paramasamya Nugraha.

b. Kondisi Makro Ekonomi

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2019 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 4 tahun terakhir 2016-2019 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 2,41% berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 2,81%. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

c. Infrastruktur

Kondisi jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2019, total panjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang 2265,46 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 20,4 km, jalan Provinsi 98,55 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1046,51 km.

Pada Tahun 2019 berdasarkan jenis permukaan jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal sepanjang 872,10 km atau 83,33% dari total panjang jalan Kabupaten. Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin

kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Pada tahun 2019 jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 677,17 km atau 64,71%, jalan kondisi sedang 220,81 km atau 21,10%, jalan kondisi rusak sepanjang 128,88 km atau 12,32% dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 19,65 km atau 1,87%. Secara rinci kondisi jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.25.
Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Keterangan	Jalan Kabupaten									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
I. Jenis Permukaan										
a. Aspal	545,29	62,27	635,77	72,54	695,31	66,29	919,29	87,84	872,10	83,33
b. Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,31	0,35	0,03
c. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,23	19,50	1,86
d. Tidak dirinci	330,42	37,73	240,73	27,46	353,52	33,71	121,57	11,62	154,56	14,78
e. Beton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	875,71	100,00	876,50	100,00	1.048,83	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00
II. Kondisi Jalan										
a. Baik	417,86	47,72	495,69	56,55	560,49	53,44	563,72	53,87	577,17	64,71
b. Sedang	223,75	25,55	229,14	26,14	321,31	30,64	256,33	24,49	220,81	21,10
c. Rusak	198,86	22,71	132,98	15,17	154,36	14,72	188,48	18,013	128,88	12,32
d. Rusak berat	35,24	4,02	18,69	2,14	12,67	1,20	37,98	3,63	19,65	1,87
JUMLAH	875,71	100,00	876,50	100,00	1.048,83	100,00	1.046,51	100,00	1.046,51	100,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar, 2020

Sementara itu terkait dengan kondisi jaringan irigasi dan embung yang berada di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.26.
Kondisi jaringan irigasi dan embung Tahun 2015-2019

Keterangan	Jaringan Irigasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
I. Kondisi Jaringan irigasi										
a. Baik	44	44	46	46	48	48	49	49	50	50
b. Sedang	28	28	30	30	31	31	31	31	31	31
c. Rusak	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
d. Rusak berat	20	20	14	14	11	11	8	8	7	7
JUMLAH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2015		2016		2017		2018		2019	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
II. Kondisi Embung										
a. Baik	1	25	3	60	4	80	4	57,14	5	71,42
b. Sedang	1	25	1	20	1	20	2	28,57	1	14,29
c. Rusak	-	0	1	20	0	0	0	0	0	0
d. Rusak berat	2	50	0	0	0	0	1	14,29	1	14,29
JUMLAH	4	100	5	100	5	100	7	100	7	100

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari komposisi penduduk yang ada menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan Kabupaten Karanganyar sebesar 65,11, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 65 orang penduduk usia tidak produktif. Angka rasio ketergantungan untuk penduduk usia muda 58,79 lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan untuk penduduk usia tua 24,05, dengan demikian Kabupaten Karanganyar telah terjadi bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan

adanya bonis demografi ini akan menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan benar.

e. Keamanan dan Kemudahan berinvestasi

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat seperti pada Tabel II.25.

Tabel II.27.
Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2015-2019

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perkosaan (Pasal 285)	0	1	1	0	0
2	Perzinahan (Pasal 287)	1	0	3	0	0
3	Pembunuhan (Pasal 340)	1	0	0	0	0
4	Penganiayaan (Pasal 351)	16	5	14	19	14
5	Pencurian Biasa (Pasal 362)	31	21	28	17	28
6	Pencurian Pemberatan (Pasal 363)	60	50	32	51	32
7	Pencurian Kekerasan (Pasal 365)	6	9	3	5	3
8	Penggelapan (Pasal 372)	33	21	12	8	18
9	Penipuan (Pasal 378)	55	23	23	17	23
10	Curanmor	15	16	15	14	15
11	Lain-lain	98	93	52	51	52

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni

1. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Urusan Konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan urusan pemerintahan

pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel II.28.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pencapaian target urusan dan program yang dilaksanakan Kabupaten Karanganyar di tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari enam urusan sebagai berikut :

a. Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk 13 indikator kinerja program dan satu indikator berstatus rendah, sebagai berikut :

Tabel II.29.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	APK PAUD	%	100	132,99	132,99	Sangat tinggi
3.	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini	%	79	83,73	105,99	Sangat tinggi
4.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF	%	100	51	51	Rendah
5.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan dasar	%	78	98,21	125,91	Sangat tinggi
6.	APK SD sederajat	%	100	115,54	115,54	Sangat tinggi
7.	APM SD sederajat	%	99,75	100	100,25	Sangat tinggi
8.	APK SMP sederajat	%	100	105,99	105,99	Sangat tinggi
9.	APM SMP sederajat	%	73	96,97	132,84	Sangat tinggi
10.	Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,01	300	Sangat tinggi
11.	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,14	0,09	155,56	Sangat tinggi
12.	Persentase sekolah SD kondisi ramah lingkungan baik	%	78	78,23	100,29	Sangat tinggi
13.	Persentase sekolah SMP kondisi ramah lingkungan baik	%	79	86,46	109,44	Sangat tinggi
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat	%	75	80	106,67	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2020

b. Kesehatan

Urusan kesehatan pada tahun 2019 dilaksanakan dengan 16 (enam belas) program yang terdiri dari 30 (tiga puluh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut, sebagai berikut :

Tabel II.30.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketersediaan obat dasar di puskesmas	%	90	90	100	Sangat tinggi
2.	Nilai IKS Kabupaten	nilai	0,205	0,22	107,32	Sangat tinggi
3.	terjaminnya mutu dan keamanan sediaan farmasi di fasyankes	%	5	5	100	Sangat tinggi
4.	berfungsinya P4TO	%	50	50	100	Sangat tinggi
5.	Persentase rumah tangga sehat	%	90	92,91	103,23	Sangat tinggi
6.	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Cakupan keluarga sadar gizi	%	82	90	109,76	Sangat tinggi
8.	Prevalensi gizi buruk	%	0,5	0,03	1666,67	Sangat tinggi
9.	Prevalensi balita stunting	%	25	25	100	Sangat tinggi
10.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
11.	persentase desa STBM	%	50	98	196	Sangat tinggi
12.	Cakupan desa/ kelurahan terjangkit KLB ditangani	%	100	100	100	Sangat tinggi
13.	Cakupan universal child immunization (UCI Desa)	%	98,3	99,40	101,12	Sangat tinggi
14.	Cakupan pelayanan P2PTM (HT, DM, ODGJ) sesuai standar	%	100	100	100	Sangat tinggi
15.	Cakupan pelayanan P2PM (DBD, TB, HIV, IMS, Malaria, Kusta, Ispa, Diare, Leptospirosis, Filariasis) sesuai standar	%	100	100	100	Sangat tinggi
16.	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	%	100	100	100	Sangat tinggi
17.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	Sangat tinggi
18.	persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu pelayanan	%	41	41	100	Sangat tinggi
19.	Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan	%	100	100	100	Sangat tinggi
20.	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	%	100	100	100	Sangat tinggi
21.	Jumlah faskes primer puskesmas dengan kondisi standar	%	11	11	100	Sangat tinggi
22.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	50	100	200	Sangat tinggi
23.	Cakupan pelayanan anak balita sesuai standar	%	90	90	100	Sangat tinggi
24.	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	91	91	100	Sangat tinggi
25.	Cakupan PIRT yang mendapatkan pelayanan rekomendasi ijin edar	%	100	100	100	Sangat tinggi
26.	Cakupan rumah makan dan restoran yang mendapatkan pelayanan sertifikat laik sehat	%	100	100	100	Sangat tinggi
27.	Cakupan pelayanan ibu hamil K4 sesuai standar	%	95	95	100	Sangat tinggi
28.	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	103	103	Sangat tinggi
29.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	Sangat tinggi
30.	Persentase komplikasi neonatal ditangani	%	100	94	94	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program dengan 12 indikator kinerja dengan status capaian kinerja 12 indikator di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan PUPR di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.31.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	67	73,89	110,28	Sangat tinggi
2.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71	85,83	120,29	Sangat tinggi
3.	Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	21	22,31	106,24	Sangat tinggi
4.	Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	19	20,93	110,16	Sangat tinggi
5.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	61	85,83	140,70	Sangat tinggi
6.	Persentase meningkatnya pelayanan pembangunan	%	80	80,32	100,40	Sangat tinggi
7.	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	80	80,57	100,71	Sangat tinggi
8.	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak	%	81	82,35	101,67	Sangat tinggi
9.	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	61	84,18	138	Sangat tinggi
10.	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku	%	80	82	102,50	Sangat tinggi
11.	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	79	80,23	101,56	Sangat tinggi
12.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.32.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,11	0,10	90,91	Sangat tinggi
2.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk.	rasio	860	861	100,12	Sangat tinggi
3.	Persentase meningkatnya Lingkungan Sehat	%	80	80	100	Sangat tinggi

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar, 2020

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yang terdiri dari 15 (lima belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk dua puluh lima indikator kinerja program, status tinggi untuk satu indikator, status rendah untuk satu indikator dan satu indikator berstatus sangat rendah. Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.33.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Rasio linmas terhadap jumlah penduduk	%	0,65	0,68	104,62	Sangat tinggi
3.	Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda	%	81	85	104,94	Sangat tinggi
4.	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	25	25	100	Sangat tinggi
5.	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%	100	94	94	Sangat tinggi
6.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	94	94	Sangat tinggi
7.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	94	104,44	Sangat tinggi
8.	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	88	88	Tinggi
9.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	90	100	Sangat tinggi
10.	Cakupan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	57	57	Rendah
11.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	79	75	94,94	Sangat tinggi
12.	Prosentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	92	92	Sangat tinggi
13.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	Sangat tinggi
14.	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	Sangat tinggi
15.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	92	21	22,83	Sangat rendah

Sumber : SATPOL PP, BAKESBANGPOL dan BPBD Kabupaten Karanganyar, 2020

f. Sosial

Urusan Sosial pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Sosial di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.34.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,5	0,5	100	Sangat tinggi
2.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	100	100	Sangat tinggi
5.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	Sangat tinggi
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	Sangat tinggi
8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2020

2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk 5 indikator dan 1 indikator berstatus sedang. Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.35.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	67,5	80,36	119,05	Sangat tinggi
2.	Persentase kenaikan Upah Riiil Tenaga Kerja (UMK)	%	8	32,02	400,25	Sangat tinggi
3.	Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	79,19	100	100	Sangat tinggi
5.	Prosentase tenaga kerja yang diterima kerja	%	85,34	62,55	73,30	Sedang
6.	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : DISDAGNAKERKOPUKM Kabupaten Karanganyar, 2020

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.36.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	30	44,12	147,06	Sangat tinggi
2.	Presentase kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	24,44	122,20	Sangat tinggi
3.	Rasio Kekerasan terhadap anak dan perempuan	Per 100.000 orang	8,37	38	22,03	Sangat rendah

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2020

c. Pangan

Urusan Pangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Pangan tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.37.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketersediaan energi per kapita	kal/kapita	1.810	2.119,40	122,62	Sangat tinggi
2.	Pangan segar tersertifikasi	produk	2	7	350	Sangat tinggi

Sumber : DISPERTANPP Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Pertanahan

Urusan Pertanahan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja capaian kinerja sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.38.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	5	5	100	Sangat tinggi
3.	Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Persentase meningkatnya fasilitas umum	%	80	80	100	Sangat tinggi

Sumber : SETDA Kabupaten Karanganyar, 2020

e. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.39.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	62	62	100%	Sangat tinggi
2.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter	12	12	100%	Sangat tinggi
3.	Prosentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	80	80	100%	Sangat tinggi
4.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	55	55	100%	Sangat tinggi
5.	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	Sangat tinggi
6.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	80	80	100%	Sangat tinggi
7.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	80	80	100%	Sangat tinggi
8.	Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	%	100	100	100%	Sangat tinggi
9.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter	12	12	100%	Sangat tinggi
10.	Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tegu batas kota)	%	33,50	33,5	100%	Sangat tinggi
11.	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	70	70	100%	Sangat tinggi
12.	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2020

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 (empat) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja

urusan admindukcapil di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.40.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	95,6	96	100,42	Sangat tinggi
2.	Cakupan penerbitan KTP el	%	97,5	99,11	101,65	Sangat tinggi
3.	Cakupan penerbitan akte kelahiran penduduk usia anak	%	91	92,38	101,52	Sangat tinggi
4.	Cakupan penerbitan akte kematian	%	50	69,4	138,80	Sangat tinggi
5.	Cakupan penerbitan KIA	%	17,5	23,07	131,83	Sangat tinggi
6.	Cakupan validasi database kependudukan	%	87,5	87,5	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Kependudukan dan Kabupaten Karanganyar, 2020

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.41.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Persentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	66	60	100	Sangat tinggi
3.	Persentase kehadiran musrenbang	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%	85	85	100	Sangat tinggi
5.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
6.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	60	60	100	Sangat tinggi
7.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Sangat tinggi
8.	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	100	100	Sangat tinggi
9.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	Sangat tinggi
10.	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%	3	3	100	Sangat tinggi
11.	cakupan peningkatan penyelenggaraan pemdes/ kelurahan	%	100	100	100	Sangat tinggi
12.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	Sangat tinggi
13.	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2020

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut

Tabel II.42.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

No	Indikator Capaian	Satuan	2019			Status
			Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presentase peserta KB Baru MKJP	%	6.490	5.568	85,79	Sangat tinggi
2.	Presentase peserta KB Aktif MKJP	%	53.581	54.968	102,59	Sangat tinggi
3.	Presentase peserta KB Baru Pria	%	1.096	392	35,77	Sangat tinggi
4.	Presentase peserta KB Aktif Pria	%	9.499	5.502	57,92	Sangat tinggi
5.	Berkembangnya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	%	45	47	104,44	Rendah
6.	Melembaganya BKB	%	373	373	100,00	Sangat tinggi
7.	Melembaganya BKR	%	180	180	100,00	Sangat tinggi
8.	Melembaganya BKL	%	213	213	100,00	Sangat tinggi
9.	Prosentase BKB Aktif	%	370	307	82,97	Sangat tinggi
10.	Prosentase BKR Aktif	%	170	101	59,41	Rendah
11.	Prosentase BKL Aktif	%	217	174	80,18	Sangat tinggi
12.	Prosentase UPPKS Aktif	%	374	300	80,21	Sangat tinggi

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2020

i. Perhubungan

Urusan Perhubungan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk enam indikator kinerja program, status tinggi untuk satu indikator, status sedang untuk dua indikator dan dua indikator berstatus sangat rendah. Capaian kinerja urusan Perhubungan didukung oleh :

Tabel II.43.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Status
			Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar	%	10	20	200	Sangat tinggi
2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	65	47	72,31	Sedang
3.	Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	134	103,03	76,89	Tinggi
4.	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	50	50	100	Sangat tinggi
5.	Jumlah orang melalui terminal pertahun	orang	2.060.000	3.502.084	170	Sangat tinggi
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	59	17,26	29,25	Sangat rendah
7.	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	1	0,05	5	Sangat rendah
8.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	65	47	72,31	Sedang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2020

j. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.44.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Status
			Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase website daerah yang terupdate (DIP)	%	69,05	73,81	106,89	Sangat tinggi
2.	Persentase KIM aktif	%	47,06	58,80	124,95	Sangat tinggi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
3.	Persentase media massa yang bekerjasama dengan PEMKAB	%	55	62	112,73	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2020

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 (dua) program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.45.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pertumbuhan Usaha baru	%	13,17	13,71	104,10	Sangat tinggi
2.	Persentase Koperasi Sehat	%	21,6	78,48	363,33	Sangat tinggi
3.	Persentase Koperasi yang melaksanakan ART	%	7,14	31,41	439,92	Sangat tinggi

Sumber : DISDAGNAKERKOPUKM Kabupaten Karanganyar, 2020

l. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk sepuluh indikator dan satu indikator dengan status sangat rendah.

Tabel II.46.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentasi Peningkatan jumlah investor	%	10	0,53	5,3	Sangat Rendah
2.	Persentase pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Cakupan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar, 2020

m. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.47.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	20	30	150	Sangat tinggi
2.	Cakupan peran serta kepemudaan	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
4.	Persentase cabang olahraga yang terbina	%	20	30	150	Sangat tinggi
5.	Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	100	100	100	Sangat tinggi
6.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%	20	40	200	Sangat tinggi
8.	Persentase meningkatnya sarana prasarana olah raga	%	80	80	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020

n. Statistik

Urusan Statistik pada tahun 2019 dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah, dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

o. Persandian

Urusan Persandian pada tahun 2019 tidak ada program yang dilaksanakan, meskipun dalam dokumen RPJMD ada programnya.

p. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.48.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pelestarian seni dan budaya	%	83	88	106,02	Sangat tinggi
2.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	70	93	132,86	Sangat tinggi
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2020

q. Perpustakaan

Pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja program perpustakaan di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.49.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah perpustakaan aktif	%	742	742	100	Sangat tinggi
2.	Jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan	%	69.738	69.738	100	Sangat tinggi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	5	5	100	Sangat tinggi
4.	Jumlah kebutuhan sarana prasarana sesuai standard	%	Ada	Ada	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2020

r. Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut. Capaian kinerja urusan kearsipan di tahun 2019 tersebut, antara lain didukung hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.50.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	75	75	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2020

2.2.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.51.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Produksi benih ikan	Ekor	38.801.434	39.854.000	102,71	Sangat tinggi
2.	Prosentase pembudidaya yang dbina	%	15	20.30	135,33	Sangat tinggi
3.	Cakupan perairan umum yang direstocking	%	5	65	1300	Sangat tinggi
4.	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	50	73	146	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar, 2020

b. Pariwisata

Urusan Pariwisata pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.52.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	20	20	100	Sangat tinggi
2.	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	20	20	100	Sangat tinggi
3.	Persentase jumlah lembaga mitra pariwisata	%	20	20	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020

c. Pertanian

Urusan Pertanian pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk tiga puluh satu indikator, status tinggi untuk satu indikator, status rendah untuk satu indikator dan enam indikator berstatus sangat rendah.

Tabel II.53.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Padi	ton	342.901	312.031	91,00	Sangat tinggi
2.	Jagung	ton	21.870	20.245	92,57	Sangat tinggi
3.	Kedelai	ton	1.602	452	28,21	Sangat rendah
4.	Kacang Tanah	ton	2.119,00	1.991	93,96	Sangat tinggi
5.	Ubi Kayu	ton	76.792,00	48.448	63,09	Rendah
6.	Ubi Jalar	ton	28.654,00	25.022	87,33	Tinggi
7.	Bawang Putih	ton	16.947,00	2.762	16,30	Sangat rendah
8.	Cabai Besar	ton	27.501,00	2.827,6	10,28	Sangat rendah
9.	Cabai Rawit	ton	8.550,00	866,3	10,13	Sangat rendah
10.	Kopi	ton	6.449,00	13	0,2	Sangat rendah
11.	Cengkeh	ton	119.647,00	118	0,10	Sangat rendah
12.	Kakao	ton	22.512,00	21.440	95,24	Sangat tinggi
13.	Kelapa dalam	ton	973,63	1.716	176,25	Sangat tinggi
14.	Kelapa Hibrida	ton	0,00	0,00	0	
15.	Tembakau	ton	584,50	210	35,93	Sangat rendah
16.	Tebu	ton	5.109,63	4.685	91,69	Sangat tinggi
17.	Persentase sarana prasarana pertanian sesuai kebutuhan	%	100	100	100	Sangat tinggi
18.	Persentase Lahan Pertanian Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	100	100	Sangat tinggi
19.	Presentase UPJA berkembang	%	40	58,04	145,10	Sangat tinggi
20.	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%	50	82,35	164,70	Sangat tinggi
21.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%	40	58,04	145,10	Sangat tinggi
22.	Cakupan peningkatan kesejahteraan petani	%	100	100	100	Sangat tinggi
23.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
24.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%	40	58,05	145,13	Sangat tinggi
25.	Presentase UPJA berkembang	%	100	100	100	Sangat tinggi
26.	Produksi Tanaman Pangan Padi	ton	307.533	312.031	101,46	Sangat tinggi
27.	Cakupan binaan kelompok tani	%	50	82,35	164,70	Sangat tinggi
28.	Angka kesakitan ternak besar	%	12	12	100	Sangat tinggi
29.	Angka kesakitan ternak kecil	%	20,4	20,4	100	Sangat tinggi
30.	Angka kesakitan unggas	%	23	23	100	Sangat tinggi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
31.	Angka kesakitan anak temak	%	23	23	100	Sangat tinggi
32.	Prosentase produk peternakan ASUH	%	92,5	92,5	100	Sangat tinggi
33.	Capaian kelompok peternak yang dibina	%	70	70	100	Sangat tinggi
34.	Cakupan pengusaha temak yang dibina	%	65	65	100	Sangat tinggi
35.	Ketersediaan bibit temak besar	dosis	9.900	9.900	100	Sangat tinggi
36.	Prosentase produk peternakan yang dipromosikan	%	50	50	100	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Kehutanan

Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan urusan Kehutanan karena tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan tersebut.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019 dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

f. Perdagangan

Urusan Perdagangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

Tabel II.54.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	40,83	41,18	100,86	Sangat tinggi
2.	PKL yang dibina dan di tata	%	35,86	36,00	100,40	Sangat tinggi

Sumber : DISDAGNAKERKOPUKM Kabupaten Karanganyar, 2020

g. Perindustrian

Urusan Perindustrian pada tahun 2019 dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru, dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

h. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada tahun 2019 dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu persentase

Penempatan Transmigrasi dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

2.2.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yang terdiri dari 20 (dua puluh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.55.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pangadaan barang/jasa	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Capaian penataan daerah otonomi baru	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur	%	100	100	100	Sangat tinggi
5.	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	5	5	100	Sangat tinggi
6.	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Cakupan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	Sangat tinggi
8.	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%	100	100	100	Sangat tinggi
9.	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	45	45	100	Sangat tinggi
10.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	30	30	100	Sangat tinggi
11.	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	%	100	100	100	Sangat tinggi
12.	Cakupan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	Sangat tinggi
13.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
14.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	Sangat tinggi
15.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	Sangat tinggi
16.	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan	%	100	100	100	Sangat tinggi
17.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	Sangat tinggi
18.	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	Sangat tinggi
19.	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	Sangat tinggi
20.	Persentase kehadiran musrenbangcam	%	98	98	100	Sangat tinggi

Sumber : Setda, Setwan, Kecamatan Kabupaten Karanganyar, 2020

b. Pengawasan

Urusan Pengawasan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk empat belas indikator dan satu indikator berstatus tinggi.

Tabel II.56.
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Status
			Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	10	30	300	Sangat tinggi
2.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	30	30	100	Sangat tinggi
3.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	95,20	95,20	Sangat tinggi
4.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	48	36,5	76	Tinggi
5.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	95,2	103,48	Sangat tinggi
6.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Sangat tinggi
8.	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Sangat tinggi
9.	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	43	74,19	173	Sangat tinggi
10.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	Sangat tinggi
11.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	30	100	297	Sangat tinggi

Sumber : Inspektorat Kabupaten Karanganyar, 2020

c. Perencanaan

Urusan Perencanaan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (sepuluh) program yang terdiri dari 12 (enam belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.57.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Status
			Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	%	100	100	100	Sangat tinggi
5.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	%	100	100	100	Sangat tinggi
6.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	100	100	100	Sangat tinggi
7.	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Sangat tinggi
8.	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	Sangat tinggi
9.	Cakupan perencanaan prasarana wilayah	%	100	100	100	Sangat tinggi
10.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%	100	100	100	Sangat tinggi
11.	Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi	%	100	100	100	Sangat tinggi
12.	Persentase meningkatnya pengembangan data informasi	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Keuangan

Urusan Keuangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.58.
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
3.	Persentase meningkatnya pengembangan data keuangan	%	80	80	100	Sangat tinggi
4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
5.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%	100	100	100	Sangat tinggi
6.	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	%	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2020

e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Tabel II.59.
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Capaian	%	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	90	90	100	Sangat tinggi
2.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	44	44	100	Sangat tinggi

Sumber : BKPSDM Kabupaten Karanganyar, 2020

f. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu indikator kinerja program yaitu cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan, dengan status capaian kinerja program di tahun 2019 adalah sangat tinggi.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU) Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.60.
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
MISI 1 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR MENYELURUH				
1.1 Tujuan Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	1) Rasio Konektivitas	29,33	26	88,65
	2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	62,31	64,63	103,72
1.1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan	0,70	1,40	-200
1.1.2. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Persentase Berkurangnya Korban Bencana Alam	0,07	0,06	85,71
1.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	1) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	66,69	64,63	96,91
	2) Persentase Kawasan Kumuh	0,76	0,61	124,59
MISI 2 : PEMBERDAYAAN PREKONOMIAN RAKYAT				
2.1. Tujuan Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	1). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,69	5,98	105,1
	2). Tingkat Inflasi	3,10	2,77	111,91
	3). PDRB Perkapita (Rp.000)	27,652	39,14	141,54
	4). Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05	2,34	130,34
2.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	1) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	14,01	13,45	96
	2) Skor Pola Pangan Harapan	86,8	99,19	114,27
2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB	Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	4,24	3,18	75
2.1.3. Meningkatnya produktivitas sektor industri perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri perdagangan	11,34	11,15	98,32
2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	46,47	45,68	98,3
2.1.5. Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor	1,5	0,23	15,33
2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja	TPAK	70,60	69,92	99,04
MISI 3 : PENDIDIKAN GRATIS SD/SMP DAN KESEHATAN GRATIS				
3.1 Tujuan: Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,64	75,89	100,33
3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	1). Harapan lama sekolah	13,7	13,66	99,71
	2). Rata-rata lama sekolah	8,6	8,49	98,72
3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup	77,32	77,8	100,62
MISI 4 : PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN				
4.1 Tujuan : Terwujudnya pemerataan antar desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6426	0,6868	106,88

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1.1 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	1). Indeks Ketahanan Sosial	0,646	0,789	122,14
	2). Indeks Ketahanan Ekonomi	0,596	0,631	105,87
	3). Indeks Ketahanan Lingkungan	0,686	0,638	93
MISI 5 : PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL BUDAYA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
5.1 Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	1). Nilai Kabupaten Peduli HAM	79,41	79	99,48
	2). Indeks Pembangunan Kebudayaan	77	88,3	114,68
	3). Prestasi pemuda dan olahraga	20	51	255
	4). Angka Kemiskinan	8,29-9,29	9,55	97,28
	5). IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97,00	91,47	94,3
5.1.1 Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	1). Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, ketertiban dan kenyamanan	140	282	-201,43
	2). Persentase tertanganinya kasus pelanggaran perda	86	86,59	100,69
	3). Persentase pengendalian kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	0	0	100
5.1.2 Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	1). Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	87,7	88,8	101,25
	2). Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,15	87,8	667,68
5.1.3 Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	1). Jumlah prestasi pemuda diregional/nasioal/ internasional	20	4	20
	2). Jumlah prestasi olahraga di regional/nasional/ internasional	20	47	235
5.1.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial	1). Pengeluaran perkapita	11,98	11,37	94,91
	2). Persentase penanganan PMKS	1,50	1,23	82
5.1.5 Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak	1). Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	74,52	80,51	108,04
	2). Kabupaten layak anak	742	745	100,4
5.2 Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Brokrasi	60	57,35	95,58
5.2.1 Meningkatnya pemerintahan yang	1). Indeks SPBE	2,14	2,99	139,72
	2). Nilai SAKIP	63	65,02	103,21

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	3). Laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP
	4). Indeks profesionalitas pegawai (IPP) / ASN	78,67	79,1	100,55
	5). IKM Kabupaten	76,67	82	106,95
	6). Maturitas SPIP	3	3	100
	7). Indeks Arsip	75	69	92

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Disamping berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2019, dalam rangka penyusunan rencana kerja Tahun 2021, juga memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun berjalan (2020). Dari dua hal tersebut diharapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, menjadi lebih tepat sasaran, lebih realistis sesuai kondisi perkembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara singkat permasalahan yang dihadapi di tahun 2020, tidak bisa lepas dari Pandemi Covid-19, dimana banyak sekali akibat yang ditimbulkannya misalnya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, permasalahan ekonomi dan sosial dan lainya.

2.3.1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak sekali permasalahan bagi pembangunan daerah. Secara singkat permasalahan-permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.61.
Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2020

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses belajar mengajar terhenti, harus dilakukan secara online; Tidak semua siswa, wilayah terlayani internet/telp; pembinaan dan pendampingan siswa tidak maksimal; 2. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan kurang maksimal tidak berjalan; 3. Evaluasi hasil pendidikan (test semester, ujian dll) kurang maksimal sehingga standar pendidikan tidak terukur dengan jelas.
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, sarana prasarana kesehatan(rumah sakit dan puskesmas) bertambah banyak dan menyedot anggaran yang besar; 5. Penularan penyakit terutama Covid-19 meningkat; 6. Banyaknya korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga medis;

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7. Banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tertunda (Masjid Agung, Gedung Wanita, Gedung Teater, Jalan Tasikmadu-Kebakkramat dll); 8. Bertambahnya dokumen teknis yang tidak jadi dilaksanakan, sehingga memerlukan perbaikan jika akan dilaksanakan (review, redisain dll).
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9. Permasalahan terutama dalam hal pelaksanaan dan penyediaan pemakaman jenazah;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10. Memerlukan banyak patroli (pengawasan dan pengendalian) untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	11. Meningkatnya masyarakat terdampak, yang membutuhkan penanganan awal dampak ekonomi (penyediaan sembako, penanganan PMKS dll); 12. Diperkirakan kemiskinan akan bertambah karena dampak ekonomi (pelarangan usaha, pembatasan jam kerja dll)
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	13. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja, pembatasan / pembagian jam kerja mengakibatkan berkurang penghasilan tenaga kerja;
2	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14. Memerlukan perhatian yang lebih banyak dan instens bagi anak-anak dan lansia terhadap virus corona (Covid-19); 15. Perlu penyediaan sarpras posyandu balita dan lansia.
3	Pangan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
4	Pertanahan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Lingkungan Hidup	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16. Perpindahan penduduk berkurang, pencatatan administrasi kependudukan
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17. Aktivitas masyarakat desa tidak begitu terdampak, aktivitas masih berjalan dengan normal, justru meningkatkan kebersamaan dan swadaya masyarakat (gotong royong : membangun portal, membantu warga yang membutuhkan dll)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18. Belum terlihat dampaknya terhadap penambahan penduduk atau pengurangan penduduk;
9	Perhubungan	19. Perlu banyak penataan dan pengawasan pengguna transportasi
10	Komunikasi dan Informatika	20. Meningkatnya penggunaan internet, penggunaan HP, pemakaian aplikasi pertemuan (Zoom, googlemeet, dll); 21. Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan secara online, yang hasilnya dirasakan kurang maksimal.
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22. Kemampuan mengembalikan pinjaman dari masyarakat mempengaruhi aktivitas koperasi, terutama koperasi simpan pinjam; 23. Usaha kecil dan menengah mengalami stagnasi atau pelambatan usaha, karena berkurangnya pesanan dan atau berkurangnya pertemuan pasar (produsen dan konsumen)
12	Penanaman Modal	24. Rendahnya / Berkurangnya investasi di daerah, karena iklim usaha yang kurang mendukung karena Covid-19.

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
13	Kepemudaan dan Olahraga	25.Terbatasnya aktivitas olah raga, terutama berkurang olah raga masal yang melibatkan banyak orang
14	Statistik	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
15	Persandian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
16	Kebudayaan	26.Berkurang event-event budaya (pentas wayang, pagelaran seni/musik dll) dan sosial (resepsi pernikahan) mempengaruhi secara langsung penghasilan pelaku seni dan pengembangan seni budaya.
17	Perpustakaan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya e-literasi;
18	Kearsipan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya arsip secara elektronik (dalam bentuk file)
III	Urusan Pilihan	
1	Kelauatan dan Perikanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
2	Pariwisata	27.Berkurangnya jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi PAD dan aktivitas ekonomi masyarakat terutama di desa (desa-desa wisata); 28.Pemeliharaan dan sarpras wisata perlu ditambah.
3	Pertanian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar, produksi pertanian masih berjalan normal;
4	Kehutanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Energi dan Sumberdaya Mineral	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
6	Perdagangan	29.Perubahan metode perdagangan yang semula secara langsung menjadi secara online
7	Perindustrian	30.Banyaknya pemutusan hubungan kerja, pembagian jam kerja mengakibatkan penghasilan karyawan berkurang atau menambah pengangguran
8	Transmigrasi	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Administrasi Pemerintahan	31.Banyaknya perubahan kebijakan, dan peraturan dari Pusat dan Provinsi, mengkaibatkannya banyak hal yang sulit untuk dilakukan koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan; 32.Penundaan pembayaran jasa bagi penyedia jasa, mengakibatkan aktivitas ekonomi daerah.
2	Pengawasan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
3	Perencanaan	33.Perubahan peraturan mempengaruhi perubahan rencana, mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi ada kegiatan baru diluar rencana yang harus dilaksanakan.
4	Keuangan	34.Pengurangan pagu anggaran bagi semua Perangkat Daerah, mengakibatkan pengurangan aktivitas pembangunan dan ekonomi wilayah sehingga dampaknya pertumbuhan ekonomi turun, inflasi akan naik dll.
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	35.Tidak dapat melaksanakan diklat bagi ASN sehingga kaderisasi kepemimpinan mungkin akan terkendala;
6	Penelitian dan Pengembangan	36.Tidak dapat berjalan dengan baik, terutama yang berupa perlombaan sehingga minat penelitian dan pengembangan berkurang, baik daerah, provinsi maupun pusat.

Dampak Pandemi Covid-19, dampak kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, dampak perubahan peraturan / kebijakan pemerintah, mengakitkannya timbulnya bebrbagai permasalahan sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan; akibatn penundaan pembangunan dan pemeliharaan;
- 2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
- 3) Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- 4) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi , seni budaya dan ruang publik;
- 5) Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
- 6) Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
- 7) Menurunnya aktivitas ekonomi di semua sektor dan wilayah, mengakitkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi;
- 8) Meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana nasional (Pandemi).

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

- 1) Meningkatnya kemiskinan, dalam hal jumlah penduduk miskin;
- 2) Meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
- 4) Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Tantangan kedepan yang diperkirakan akan dialami Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain :

- a) Penanggulangan COVID 19 sampai dengan ditemukannya vaksin masih menjadi tantangan pembangunan, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2021 lebih diutamakan pada kesehatan, penanggulangan dampak COVID 19 (kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan sosial) yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.
- b) Perubahan kebijakan dan penganggaran baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, alokasi pendanaan pembangunan terutama penanggulangan COVID-19 dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin;
- c) Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 berdampak pada perlambatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (irigasi, rehab jalan dan jembatan serta pembangunan air bersih);
- d) Bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tiadanya lowongan pekerjaan, banyaknya pekerja di kota besar yang pulang kampung dan pencari kerja di sektor industri dan jasa meningkat;
- e) Meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang terus naik.

2.3.2. Isu Strategis

Beberapa permasalahan tersebut dapat ditarik ke dalam isu strategis pembangunan daerah tahun 2021 sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Kemiskinan setiap tahun menjadi isu utama pembangunan, apalagi di tahun 2021 nanti, diperkirakan angka kemiskinan akan bertambah sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19. Isu kemiskinan tidak terlepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun capaian angka kedua indeks kemiskinan tersebut menunjukkan kondisi yang membaik, namun masih perlu terus dipacu sehingga rata-rata pengeluaran penduduk miskin akan semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Isu 1) masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan; 2) keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan, dan 3) Jumlah penduduk miskin di Karanganyar persentase jumlahnya masih melebihi persentase nasional.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial maupun kebijakan daerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar termasuk dalam: masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas. Dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial maka penting keberadaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

b. Pengangguran

Akibat adanya pandemi virus Corona di tahun 2020, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang kemungkinan mengalami kenaikan. Potensi bertambahnya jumlah pengangguran ditahun 2021 karena adanya pandemi covid di tahun 2020, menyebabkan banyaknya usaha yang harus tutup sehingga memaksa merumahkan karyawannya. Secara umum permasalahan pengangguran di Karanganyar adalah 1) Masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi. Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan merupakan sektor “penampung” peralihan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, disamping itu angkatan kerja baru lebih memilih sektor tersebut dibandingkan Sektor Pertanian. Komposisi penurunan jumlah pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri, Perdagangan dan Konstruksi perlu diperhatikan utamanya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja; 2) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar kerja berpotensi menambah jumlah pengangguran, dan 3) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

c. Infrastruktur

Isu strategis dibidang infrastruktur yang dihadapi antara lain : 1) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan; 2) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian; 3) ketersediaan energi listrik, air bersih, gas, dan bakar minyak yang terus meningkat dan perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan; 4) Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) antara lain : masih terbatasnya kapasitas bandwidth internet, kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center serta keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat

terhadap TI serta kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.

d. Sumberdaya Manusia (SDM)

Isu sumberdaya manusia terkait erat dengan ketersediaan sarana prasarana dan hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan adalah: 1) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; 2) Adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti di kalangan siswa; 3) Kondisi sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer dan 4) Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal.

Di bidang kesehatan adalah : 1) Masalah stunting bisa terjadi pada semua kalangan umur baik balita, anak-anak, remaja, dewasa dan bahkan sampai pada lanjut usia, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja; 2) Meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti Covid-19, penemuan kasus TB paru, dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD, tingginya kasus HIV/AIDS; dan masih kurangnya kesadaran pola hidup sehat, 3) belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda.; 4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya, 5) Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan di Karanganyar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dan 6). Jika vaksin covid 2019 belum ditemukan di tahun 2020, maka penemuan vaksin covid 2019 menjadi tantangan di tahun 2021.

Pembangunan sumberdaya manusia tidak bisa lepas dari seni dan budaya. Isu strategis yang tampak di bidang seni dan budaya adalah: 1) kecenderungan semakin mudarnya nilai budaya sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan 2) masih rendahnya upaya melakukan

perlindungan situs, bangunan, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi.

Isu strategis SDM lainnya adalah upaya meningkatkan keadilan gender 1) masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya, 2) peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih kurang.

e. Kondisi ekonomi masyarakat dan daerah

Berbagai permasalahan terkait kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah adalah terkait dengan : 1) keberadaan koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Dengan adanya pandemi covid 2019 di tahun 2020 ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan melemahnya usaha di masyarakat karena berkurangnya daya beli masyarakat, 2) Permasalahan wisata seringkali merupakan permasalahan yang saling kait mengkait, kunjungan sedikit karena kurang daya tarik, obyeknya tidak menarik, karena tidak ada dana untuk membangunnya, tidak ada dana karena tidak ada pengunjung. 3) terkait dengan iklim investasi di Karanganyar di antaranya adalah kurang optimalnya pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 4) Karanganyar belum mampu mewujudkan sebagai kabupaten yang berdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan daerah.

f. Reformasi Birokrasi

Isu strategisnya adalah struktur kelembagaan “maksimal/gemuk”, etos kerja yang tidak merata tidak semua pegawai mempunyai etos kerja tinggi, pengembangan karier aparatur, belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur. Paradigma birokrasi yang belum dikembangkan secara optimal adalah transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Permasalahan yang dihadapi Karanganyar terkait dengan aset daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu masih belum optimalnya pengelolaan asset daerah. Berbagai upaya untuk memanfaatkan asset daerah dengan baik, telah dilakukan, namun

hasilnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Masalah lain adalah aset daerah yang seringkali mengganggu pencapaian pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

g. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Karanganyar saat ini adalah masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi hutan, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan; berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan.

Karanganyar mempunyai wilayah yang tergolong rawan bencana, karenanya diperlukan kesiapsiagaan dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana guna mengurangi risiko bencana. Permasalahan yang dihadapi Karanganyar terkait dengan penanggulangan bencana adalah masih sedikitnya jumlah dan belum optimalnya SDM dan relawan terlatih serta terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2020 dan perkiraan Tahun 2021, yang mencakup antara lain indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berbagai lembaga keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II negatif hingga -6 persen. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga -3,1 persen pada kuartal II/2020. Meskipun pada kuartal I positif, namun kuartal kedua di perkirakan akan terjadi kontraksi karena PSBB, di perkirakan negatif, minus 3,1 persen. Pertumbuhan negatif ini, disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, yang hampir semuanya menyatakan negatif, bahkan hingga -6 persen. Namun demikian hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja kuartal II lebih baik dibandingkan hasil asesmen sebelumnya pada Mei 2020. Hal ini memberikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di 2020. Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) nantinya juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Perekonomian Indonesia 2020 akan sangat ditentukan apakah di kuartal ketiga akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua, dan apakah di kuartal keempat memang akan ada paling tidak recovery yang mulai muncul. Sampai saat ini, Pemerintah belum mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yakni -0,4 sampai dengan 2,3 meskipun point estimate-nya sudah semakin mendekati di level antara 0 hingga 1 persen. (sumber : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4280408/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-bakal-minus-3,1-persen>)

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bertumbuh 5,27%5,47% dari tahun 2015-2019. Struktur perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2019 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (33,88%); pertanian, kehutanan dan perikanan (14,56%); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,48%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019, Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,07 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,96 persen, serta Konstruksi sebesar 0,60 persen. Sedangkan pertanian memberikan sumbangan sebesar -0,23 persen di bawah infokom yang memberikan sumbangan 0,55 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2020 akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Hasil simulasi BI, proyeksi PDRB Jateng hanya akan tumbuh di bawah 5 persen. Meski demikian, proyeksi ini masih sangat dinamis, tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan seberapa efektif upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 pada angka 4,15% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah tahun 2021 meskipun akan terjadi kontraksi pada tahun 2020, namun diprediksikan masih terkendali pada kisaran 3,0±1% melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Tabel III.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2021

No	Indikator	Target 2021
1.	PDRB per kapita (Rp. Juta rupiah)	41,15
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,1-5,0
3.	Inflasi (persen)	3,0 ± 1
4.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rupiah)	64.742
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,8-5,80
6.	Kemiskinan (persen)	10,96 – 11,80
7.	Rasio Gini	0,33 – 0,35
8.	Indeks Williamson	0,58
9.	Nilai Tukar Petani	106 (per Desember)

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Prov. Jateng 2021.

3.1.2. Kerangka Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi.

Tabel III.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2015	26.904.049,89	9,21	21.286.287,15	5,05
2016	29.322.302,42	8,99	22.428.803,81	5,37
2017	31.780.396,96	8,38	23.665.952,05	5,52
2018	34.287.872,56	8,72	25.150.277,73	5,98
2019	37.013.093,96.	7,95	26.641.186,38	5,93

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB tahun 2015-2019.

Tabel III.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91	4.612.407,76	4.774.413,19
2. Pertambangan dan Penggalian	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56	412.137,54
3. Industri Pengolahan	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97	17.028.889,02
4. Listrik, Gas dan Air Minum	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48	55.837,73
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90	24.036,59
6. Konstruksi	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83	2.662.576,89
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67	4.192.542,89
8. Transportasi dan Pergudangan	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52	892.326,71
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31	1.207.963,31
10. Informasi dan Komunikasi	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52	457.262,77
11. Jasa Keuangan	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76	1.315.872,27
12. Real Estate	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77	629.622,08
13. Jasa Perusahaan	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33	147.441,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30	687.212,66

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
15. Jasa Pendidikan	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76	1.665.173,08
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07	309.739,85
17. Jasa lainnya	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05	550.046,11
PDRB	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	34.287.872,56	37.013.093,96

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK tahun 2015-2019.

Tabel III.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.797,36	3.255.968,59
2. Pertambangan dan Pengalihan	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13	260.966,08
3. Industri Pengolahan	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08	12.177.776,57
4. Listrik, Gas dan Air Minum	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,80	45.807,19
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68	20.983,30
6. Konstruksi	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48	1.705.066,84	1.839.116,77
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02	3.249.326,57
8. Transportasi dan Pergudangan	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.198,07	748.376,94
9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	697.279,26	732.397,77	771.278,70	828.695,17	905.378,27
10. Informasi dan Komunikasi	315.512,46	338.040,05	365.995,96	427.715,42	477.490,46
11. Jasa Keuangan	705.929,31	760.048,58	819.720,53	888.659,50	895.221,22
12. Real Estate	403.183,16	426.366,19	451.138,07	476.205,55	504.126,34
13. Jasa Perusahaan	70.905,07	77.414,16	84.954,29	93.988,31	104.087,38
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	441.204,73	450.205,31	459.929,74	469.542,27	479.673,45
15. Jasa Pendidikan	803.580,33	803.580,33	908.533,43	973.744,20	1.032.341,60
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.531,82	164.531,82	189.245,46	205.912,76	219.428,19
17. Jasa lainnya	314.442,75	314.442,75	350.478,69	384.464,47	425.117,46
PDRB	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05	25.150.317,63	26.641.186,38

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan

kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 46,01 persen), Pertanian (menyumbang sekitar 12,90 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (menyumbang sekitar 11,33 persen).

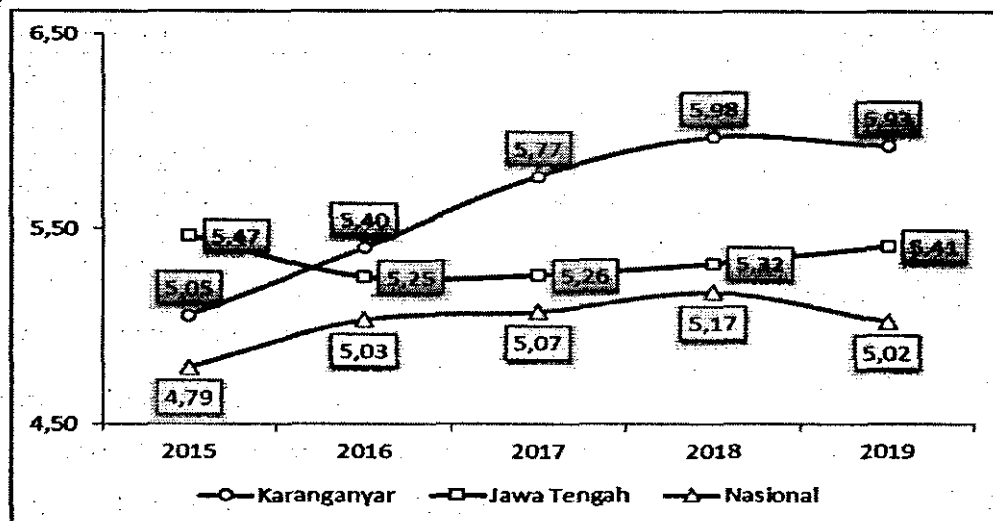
Tabel III.5.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,89	14,31	13,51	13,45	12,90
2. Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,24	1,22	1,22	1,11
3. Industri Pengolahan	45,21	45,78	45,89	45,68	46,01
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,06	0,06
6. Konstruksi	6,37	6,39	6,58	6,97	7,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	11,06	11,20	11,15	11,33
8. Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,48	2,60	2,41	2,41
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,27	3,33	3,33	3,19	3,26
10. Informasi dan Komunikasi	1,06	1,05	1,09	1,18	1,24
11. Jasa Keuangan	3,41	3,47	3,62	3,75	3,56
12. Real Estate	1,74	1,71	1,71	1,71	1,70
13. Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,10	2,08	2,02	1,93	1,86
15. Jasa Pendidikan	4,27	4,30	4,39	4,46	4,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84
17. Jasa lainnya	1,41	1,42	1,41	1,45	1,49
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

b. Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebesar 5,93%, sedikit melampaui dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2015-2019.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karanganyar, Prov Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 5,05 % pada tahun 2015 menjadi 5,93 % pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya / kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2019 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 berada di peringkat 2 setelah Kabupaten Boyolali. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

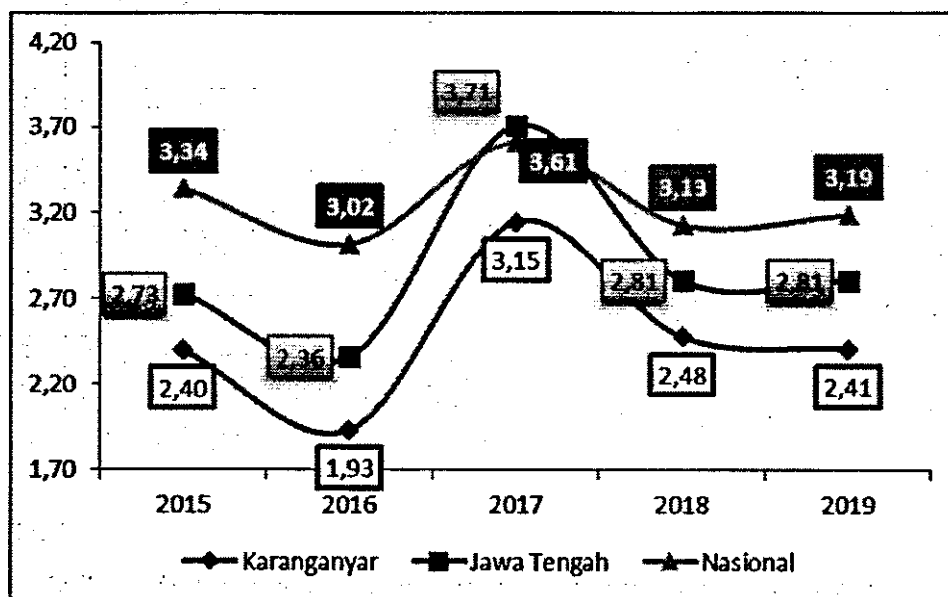
Tabel III.6.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Boyolali	5,96	5,33	5,80	5,72	5,96
2	Klaten	5,30	5,17	5,33	5,57	5,57
3	Sukoharjo	5,69	5,72	5,76	5,82	5,92
4	Wonogiri	5,40	5,25	5,32	5,41	5,14
5	Karanganyar	5,05	5,40	5,77	5,98	5,93
6	Sragen	6,05	5,77	5,97	5,75	5,90
7	Surakarta	5,44	5,35	5,70	5,75	5,78
8	Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,32	5,41
9	Nasional	4,79	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

c. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2015-2019) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,40% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,41%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah 2015-2019

3.1.3. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkembangan keadaan saat ini (tahun 2020) dan terjadinya Pandemi Covid-19 maka perkiraan pemulihan ekonomi akan terjadi tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi di dokumen RPJMN 2020 - 2024 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan, namun tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan pada ketidakpastian ekonomi global. Adapun risiko tahun 2020-2021, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perang dagang RRT dengan Amerika Serikat menimbulkan dampak ekonomi antara lain penurunan jumlah wisatawan asing di Indonesia dan efek bergandanya berdampak pada perhotelan, perjalanan dan angkutan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjangkit Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan menurunnya ekspor ke AS diperkitakan karena Indonesia hilangnya kemudahan ekspor ke AS (Indonesia tidak lagi negara berkembang), sehingga nilai ekspor menjadi menurun. Maka harus dikembangkan pasar ekport ke negara lainnya (seperti Timur Tengah, Jepang dan Amerika Utara).

Ancaman yang diperkirakan dialami Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain :

1. Penanggulangan CIVID 19 damapi dengan ditemukannya vaksin masih menjadi tantangan pembangunan, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2021 lebih diutamakan pada kesehatan, penanggulangan dampak COVID 19 (kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan sosial) yng berdampak pada melembahnya pertumbuhan ekonomi.
2. Perubahan kebijakan dan penganggaran baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, alokasi pendanaan pembangunan terutama penanggulangan COVID-19 dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin;
3. Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 erdampak pada perlambatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (irigasi, rehab jalan dan jembatan serta pmbangunan air bersih);
4. Bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tiadanya lowongan pekerjaan, banyaknya pekerja di kota besar yang pulang kampung dan pencari kerja di sektor industri dan jasa meningkat;
5. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang terus naik.

b. Penanggulangan dan Pengurangan Angka Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu tahun 2015 - 2019, menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan di Kab. Karanganyar sebesar 9,55% di tahun 2019 lebih rendah daripada Jawa Tengah (10,32%). Pengembangan perekonomian daerah harus mampu mengurangi Namun adanya Pandemi CIVID -19 akan terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) termasuk pemerintah desa/kelurahan.

c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015 - 2019 bersifat fluktuatif, namun jika memperhatikan pertumbuhan dengan daerah lain ataupun Provinsi Jawa Tengah maka Kab. Karanganyar masih lebih baik, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya saing daerah, terutama adalah hasil-hasil pertanian/perkebunan, hasil industri UMKM semakin mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar semakin berdaya saing.

d. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Perkembangan kualitas sumberdaya manusia jika dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2019 sebesar 75,89, dengan nilai usia harapan hidup, (adalah 77,38 tahun), jumlah penduduk miskin (sebesar 9,55%) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019. Tantangan dalam peningkatan kualitas dan daya saing terutama adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masuk pasar kerja (lulus SD/SLTP), belum optimalnya kewirausahaan, keterampilan calon tenaga kerja kurang beragam dan penguasaan teknologi informasi (TI) masih rendah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, diupayakan dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, menumbuhkan rasa nasionalisme, meningkatkan kemampuan dan berwirausahaan, pengembangan pasar UMKM di perdesaan dan sektor ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan untuk mencegah radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA pada penduduk usia produktif, sertaantisipasi dampak meningkatnya usia lanjut (non produktif)..

e. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting, dalam pengembangan ekonomi daerah. Pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan pembangunan (terutama pemanfaatan air tanah dan air permukaan, alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan). Pemeliharaan lingkungan hidup sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, pencegahan kerusakan

ekosistem pegunungan (daerah resapan, ruang terbuka hijau, kebakaran dan banjir dll) menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan pengembangan ekonomi harus memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, menjadi perhatian dalam pengembangan perekonomian daerah.

f. Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Kebijakan lainnya adalah menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan. Desa sebagai pusat produksi pangan harus menjadi fokus dalam peningkatan kedaulatan pangan daerah.

Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi. Disamping itu pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan di daerah terutama di perdesaan.

g. Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Dalam pembangunan wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat ketertinggalan bagian Selatan (Kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jumapolo dan Kecamatan Jatipuro) dan bagian Utara (Kecamatan Jenawi, dan Kerjo) dibandingkan wilayah Barat (Kecamatan Colomadu dan Kecamatan Jaten) dan Kecamatan Karanganyar sebagai Pusat Pemerintahan dan perdagangan dan jasa di Kabupaten Karanganyar.

Tantangan pembangunan wilayah agar dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yaitu dengan membuka akses jaringan transportasi antar wilayah menghubungkan kawasan penghasil pertanian, perkebunan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemasaran hasil pertanian/perkebunan dan distribusi barang/ jasa. Pentingnya pengembangan prasarana jalan, jembatan dan sarana perekonomian perdesaan, transportasi umum dan distribusi hasil pertanian dan inustri ke pasar di kawasan perkotaaan.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah dan dampak pandemi Covid-19, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Karanganyar diperkirakan, sebagai berikut :

Tabel III.7.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Target RKP
1.	PDRB per kapita (ADHK Rp. Juta)	28.556	28.556
2.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,9	2 - 3
3.	Inflasi (%)	3,05	3,5 - 3,0
4.	Nilai investasi (Rp. Trilyun)	23,163	10-16
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,90-3,10	2,90-3,10
6.	Kemiskinan (%)	8,51-8,92	8,92-9,55

Sumber : Baperlitbang, 2020.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dijelaskan berdasarkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola semakin tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan.

- 1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak/Retribusi Daerah (sistem billing);
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi (pembaruan data wajib pajak, pemberian *reward and punishment* dll);
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran Perda Retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
- 2) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
- 3) Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda dengan penyertaan modal;
- 4) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;

5) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Secara rinci realisasi dan rencana pendapatan tahun 2018-2021, dapat dilihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8.
Realisasi Pendapatan dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2018-2022 (*proyeksi)

KODE REK	URAIAN	TAHUN (Rp. 000)				
		2018	2019	2020	2021*	2022*
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	2.113.929.231	2.179.409.706	2.225.308.095	2.135.743.095,88	2.586.234.192
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.156.469	387.763.013	357.146.402	432.433.767,88	498.583.214
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	167.176.622	185.331.600	169.700.000	219.561.000	219.866.558
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.521.606	10.952.823	12.837.216	11.457.000	22.787.894
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.026.583	15.278.078	13.184.344	15.700.000	21.104.042
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.431.656	176.200.510	161.424.842	185.715.767,88	234.824.720
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.325.732.297	1.358.762.557	1.398.560.239	1.241.804.354	1.637.825.879
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	38.881.727	29.554.921	35.417.454	39.121.370	44.366.507
4.2.2	Dana Alokasi Umum	978.664.650	1.018.544.740	1.027.021.995	924.285.617	1.189.572.999
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.185.919	310.662.896	336.120.790	278.397.367.	403.886.373
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	445.040.464	398.498.360	469.601.454	461.504.974	449.825.099
4.3.1	Pendapatan Hibah	85.848.040	85.256.160	92.347.200	92.347.200	94.396.945
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	142.435.400	148.991.486	132.533.194	132.533.194	151.582.949
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.089.437	191.230.266	244.721.060	235.966.580	203.845.205
4.3.5	Bantuan Keuangan dr.Prov/ Pemda Lainnya	9.667.587	7.406.223	-	658.000	0
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber : BKD, 2020

Dalam rangka pelaksanaan PP 12/2019, bentuk postur Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2022, adalah sebagai berikut :

Tabel III.9.
Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2022, sesuai PP 12/2019

KODE REK	URAIAN	TAHUN (Rp. 000)	
		2021	2022
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	2.135.743.095,88	2.586.234.192
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	432.433.767,88	498.583.214
4.1.1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>219.561.000</i>	<i>219.866.558</i>
4.1.2	<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	<i>11.457.000</i>	<i>22.787.894</i>
4.1.3	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>15.700.000</i>	<i>21.104.042</i>
4.1.4	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	<i>185.715.767,88</i>	<i>234.824.720</i>
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.610.962.128	1.993.254.033
4.2.1	<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.477.770.934</i>	<i>1.841.671.084</i>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.241.804.354	1.637.825.879
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	69.826.124	0

KODE REK	URAIAN	TAHUN (Rp. 000)	
		2021	2022
1	2	3	4
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0	203.845.205
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	0	0
4.2.1.5	Dana Desa	166.140.456	0
4.2.2	Transfer Antar Daerah	133.191.194	151.582.949
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	132.533.194	151.582.949
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	658.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.347.200	94.396.945
4.3.1	Hibah	92.347.200	94.396.945
4.3.2	Dana Darurat	0	0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0

Sumber : BKD dan RPJMD, 2020

3.2.2. Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 diprioritaskan, sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
- 2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- 4) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah, memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- 5) Belanja daerah yang mengalokasikan kepada Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 6) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau dana kelurahan, diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 7) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Arah Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian

1) **Belanja Operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- (1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- (3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- (5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

2) **Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- (3) batas minimal kapitalisasi aset.

3) **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - o kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - o Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - o Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - o Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4) **Belanja Transfer**, sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
- (1) **Belanja Bagi Hasil** adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - (2) **Belanja Bantuan Keuangan** merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
2. Perlu adanya penyesuaian Belanja Hibah dan Bansos, yang sebelumnya tercantum dalam DPA-PPKD/BPPKAD, menjadi diampu oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang membidangi, termasuk dalam hal ini beberapa hibah yang meliputi:
- 1) Hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (yang semula di PPKD menjadi diampu oleh masing-masing kelurahan);
 - 2) Hibah BPMKS (swasta) dan Bansos BPMKS (dari PPKD ke Dinas Pendidikan);
 - 3) Hibah lainnya yang semula di PPKD ke OPD yang membidangi.
3. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (*mandatory spending*) dan menjadi prioritas anggaran, antara lain
- 1) Pendidikan (20%);
 - 2) Kesehatan (10%);
 - 3) Infrastruktur (25%); dan
 - 4) Pendanaan kelurahan dari APBD (5% pendapatan daerah dikurangi DAK) serta rasio belanja modal yang makin meningkat.

4. Belanja prioritas RKPD Tahun 2021, meliputi :
 - 1) Keberlanjutan program BPMKS;
 - 2) JKN KIS APBD;
 - 3) Infrastruktur kota (termasuk penanganan kawasan kumuh); dan
 - 4) SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
5. Pemenuhan belanja operasional OPD/ unit kerja harus diarahkan agar semakin terukur;

Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.10.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN (Rp.000)				
		2018	2019	2020	2021*	2022*
2	BELANJA	2.279.841.882	2.313.588.178	2.287.236.745	2.145.743.095,88	2.586.234.192
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.428.577.435	1.451.700.668	1.451.728.591	1.423.982.317,15	1.633.464.485
2.1.1	Belanja Pegawai	991.088.189.	1.010.868.981	1.021.551.870	947.227.162,25	1.086.220.840
2.1.2.	Belanja Bunga		0	5.000.000	5.000.000	4.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	95.504.356.	66.394.000	61.549.000	82.370.421	88.591.442
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.825.000.	13.795.000	16.842.000	23.170.237	28.178.750
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.419.192.	17.923.459	18.254.330	31.819.551	38.731.326.
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	317.240.698	340.219.228	326.031.391	331.894.945,9	385.242.127
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	851.264.447	1.010.834.778	835.508.154	721.760.778,73	1.112.663.675
2.2.1	Belanja Pegawai	32.171.292	7.005.593	8.787.530	10.530.864	12.313.157
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.283.534.	632.135.012	618.798.319	224.716.756,6	543.357.034
2.2.3	Belanja Modal	303.809.619.	371.694.172	207.922.304	466.513.158,13	556.993.484

Sumber : BKD, 2020

Ket : 2018-2019 LRA, 2020 APBD, 2021-2022 proyeksi, 2020

Sedangkan proyeksi belanja untuk Tahun 2021-2022, sesuai dengan Postur dalam PP 12/2019 adalah :

Tabel III.11.
Proyeksi 2021-2022 berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019

No	Uraian	TAHUN (Rp.)	
		2021	2022
1	2	3	4
5	BELANJA	2.145.743.095.880	2.746.128.160.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.313.015.440.850	1.762.661.223.000
5.1.1	Belanja Pegawai	957.758.026.250	1.086.220.840.000
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.716.756.600	555.670.191.000
5.1.3.	Belanja Bunga	5.000.000.000	4.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	82.370.421.000	88.591.442.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.170.237.000	28.178.750.000
5.2	BELANJA MODAL	466.513.158.130	556.993.484.000

No	Uraian	TAHUN (Rp.)	
		2021	2022
1	2	3	4
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000	2.500.000.000
5.3.	BELANJA TRANSFER	363.714.496.900	423.973.453.000

Sumber: BKD 2020, diolah

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, untuk Kabupaten Karanganyar direncanakan akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang tentunya juga akan membutuhkan dukungan dana pendampingan dari daerah. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.12.

Rencana Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar

No.	No Urut Lampiran Perpres	Sektor	Kawasan Prioritas	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1	18	Perdagangan	KSPN Borobudur	Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. Karanganyar	50	APBN
2	22	Pemukda Olah Raga	KSPN Borobudur	Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar	50	APBN
3	26	Pertanian	KSPN Borobudur	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar	50	APBN

Sumber : Perpres 79 tahun 2019

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Berikut realisasi pembiayaan Tahun 2018-2019 dan perkiraan pembiayaan tahun 2020-2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.13.
Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2022

No	Uraian	TAHUN (Rp.000)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	187.137.756	290.053.215	185.078.238	50.000.000	199.893.968
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.963.056	221.485.431	185.078.238	50.000.000	199.893.968
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	68.457.159	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	174.700	110.625	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000	10.000.000	59.200.000	40.000.000	40.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000	10.000.000	29.200.000	10.000.000	10.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	172.137.756	280.053.215	61.928.650	10.000.000	159.893.968

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui kemampuan pendanaan tahun 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.185.743.095.880** berasal dari pendapatan **Rp. 2.135.743.095.880,-** ditambah dengan perkiraan SiLPA sebesar **Rp. 50.000.000.000,-**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi dan Misi

Tahun 2021 merupakan tahun ke III pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023.

a. Visi

Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku

kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah, (2) Unsur DPRD, (3) Unsur dunia usaha dan *pers* (media), (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/forum /lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan wilayah yang lebih baik, pada semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan Karanganyar

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- 1) Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- 3) Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- 4) Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

b. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.

2) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intanpari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, *modern* dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat. Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4) Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya

sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-government, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah
3. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan pemerataan antar desa
5. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.
6. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
3. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
4. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan
5. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB
6. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan
8. Meningkatnya nilai investasi daerah
9. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
10. Meningkatnya kualitas pendidikan
11. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
12. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.
13. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
14. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
15. Meningkatnya kesejahteraan sosial
16. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak
17. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang hendak dicapai ditunjukkan dengan beberapa indikator dengan target capaian di tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Misi, tujuan, sasaran dan target indikator tahun 2021

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	8
Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh						
1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan						
	1. Rasio konektivitas				30,33	
	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,02	Lingkungan Hidup
			2) Persentase kawasan kumuh	%	6	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.2 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	3) Penurunan Angka Kecelakaan	%	12	Perhubungan
		1.1.3 Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	0,06	KKUPM
Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian Rakyat						
2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah						
	2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi			%	2-3	Statistik

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	8
		3. Tingkat inflasi		%	3,5±1	Statistik
		4. PDRB Perkapita (Rp.000)		Rp.000	28.556	Statistik
		2.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	15,01	Pertanian
			6) Skor Pola Pangan harapan	Score	89	Pangan
		2.1.2. Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,1	Pariwisata
		2.1.3. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,56	Perdagangan
		2.1.4. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	47,14	Perindustrian
		2.1.5. Meningkatnya nilai investasi daerah	10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,8	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka		%	2,90-3,10	Tenaga Kerja
		2.1.6. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11) TPAK	%	71,44	Tenaga Kerja
Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis						
3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi						
		6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	75,84	Perencanaan
		3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,74	Pendidikan
			13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,7	Pendidikan
		3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,82	Kesehatan
Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan						
4.1 Mewujudkan pemerataan antar desa						
		7. Indeks Desa Membangun (IDM)		indek	0,6446	Permasdes
		4.1.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,648	Permasdes
			16) Indeks Ketahanan Ekonomi	indek	0,598	Permasdes
			17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,688	
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga						
5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.						
		8. Nilai Kabupaten Peduli HAM			79,41	Administrasi Pemerintahan
		5.1.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	130	KKUPM
			19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	88	KKUPM

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	8
			20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus)	%	0	KKUPM
		9. Indeks Pembangunan Kebudayaan			79	Kebudayaan
	5.1.2. Meningkatnya pelestarian dan pengeolaan kebudayaan		21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	88,5	Kebudayaan
		22) Indeks Pembangunan Pemuda		%	0,65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.1.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga		23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional	Unit	30	Pemuda dan Olahraga
			24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	30	Pemuda dan Olahraga
		10. Angka kemiskinan		%	8,92-9,55	Perencanaan
	5.1.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial		25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	13,35	Perencanaan
			26) Persentase Penanganan PMKS	%	2,00	Sosial
		11. IPG (Indeks Pembangunan Gender)		indeks	97,25	PP dan PA
	5.1.5. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak		27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,71	PP dan PA
			28) Kabupaten Layak Anak	Score	762	PP dan PA
	5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik					
		12. Indeks Reformasi Birokrasi		indeks	70	Administrasi Pemerintahan
	5.2.1 Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas		29) Indeks SPBE	Indeks	2,69	Kominfo
			30) Nilai SAKIP	nilai	70	Administrasi Pemerintahan
			31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Keuangan
			32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	82,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	%	80,43	Administrasi Pemerintahan
			34) Maturitas SPIP	Level	3	Pengawasan
			35) Indeks Arsip	Indeks	81	Kearsipan

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar 2018-2023

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

a. Tema dan Target Pembangunan Nasional Tahun 2021

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,47,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

b. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur : melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi dalam Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi : memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi dengan Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a). Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b). Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c). Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d). Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e). Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan
 - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f). Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g). Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan

- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - h). Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
 - 5) reformasi fiskal; dan
 - 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- i). pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - j). distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - k). peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - l). memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - m).meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a). Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

- b). Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
 - 4) kesejahteraan sosial.
- c). Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d). Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e). Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - 3) kualitas pemuda.
- f). Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g). Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program

Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a). Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
- 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
- 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
- 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
- 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b). Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
- 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
- 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
- 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

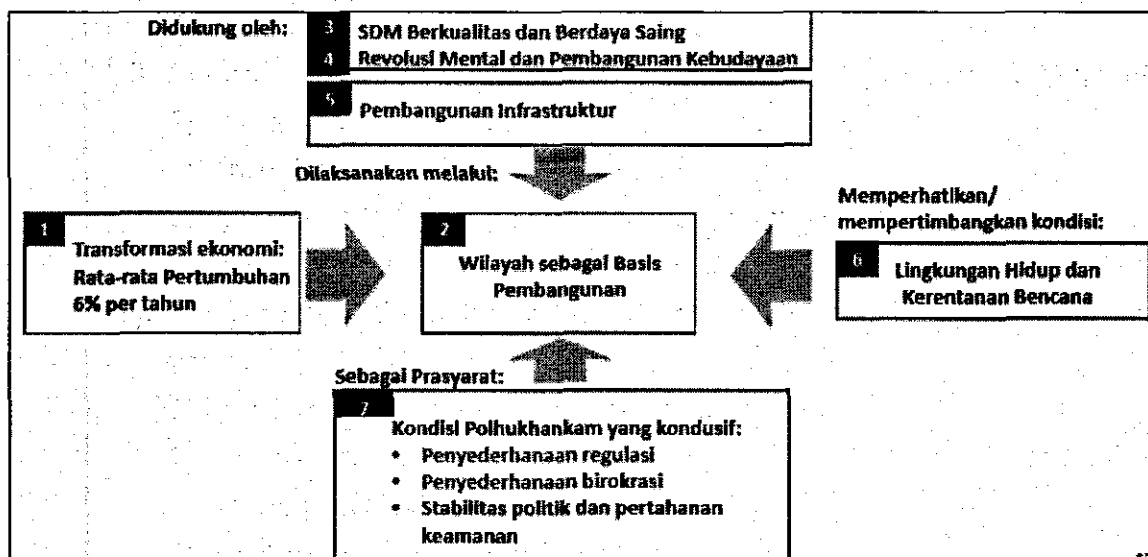
c). Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
- 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
- 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;

- 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d). Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a). Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b). Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c). Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) transportasi perkotaan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d). Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

- e). Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b). Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c). Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - 3) pengelolaan limbah;
 - 4) pengembangan industri hijau; dan
 - 5) rendah karbon pesisir dan laut
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a). Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
 - 3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan
 - 4) peningkatan peran indonesia di tingkat regional dan global.
- c). Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penataan regulasi;
 - 2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
 - 3) penguatan sistem anti korupsi; dan
 - 4) peningkatan akses terhadap keadilan.
- d). Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e). Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM);
 - 3) penguatan keamanan laut;
 - 4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.



Gambar 4.1
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM” dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemanjapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pembangunan pada :

1) Pengurangan kemiskinan;

- (1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya dalam mengurangi beban pengeluaran;
- (2) Penguatan *sustainable livelihood* dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- (3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD;

2) Menurunkan angka pengangguran :

- (1) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
- (2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi;
- (3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing, fokus pada :

- 1) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- 2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitative dalam pembangunan kesehatan;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan;
- 4) Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif / non produktif;

c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, fokus pada :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian;

- 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- 3) Pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), peningkatan efektivitas stimulan lumbung pangan, peningkatan kualitas pengelolaan stok dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- 6) Peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan; Peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- 8) Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi, memacu ekspor dan meminimalisir impor serta menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah;
- 9) Peningkatan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, keselamatan orang/penumpang serta konektivitas antar wilayah, pusat pertumbuhan baru baik skala regional maupun lokal serta kawasan perbatasan, kawasan peruntukan industri dan wisata untuk mendukung perekonomian, pemerataan dan pengembangan wilayah;
- 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana;
- 11) Pengawasan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019;

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*) dan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) yang terintegrasi;
- 2) Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif; peningkatan kemandirian fiskal keuangan daerah dan mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah; penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner; pengendalian dan penegakan produk hukum serta peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanganan permasalahan dengan Aparat Pengawas Eksternal;
- 3) Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan,

obyektif dan akuntabel; penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif, serta perbaikan tunjangan kinerja daerah;

- 4) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan.

Target kinerja utama daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yaitu:

- 1) Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
- 3) Angka Kemiskinan turun menjadi 10,96 – 11,80 persen;
- 4) Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80 – 5,80 persen;
- 6) Pertumbuhan Ekonomi antara 4,10 – 5,00 persen;
- 7) Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
- 8) PDRB per kapita sebesar 41,15 juta rupiah;
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,58;
- 10) Nilai Tukar Petani 106 (per Desember);
- 11) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,77;
- 12) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
- 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Rencana pembangunan daerah tahun 2021 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu :

- 1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- 2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
- 3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
- 4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- 5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- 6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- 7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- 8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

- 9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- 10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 memperhatikan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2021. Tahun 2021 mengambil tema ***“Maju dan Berdaya Saing”*** dengan fokus ***“Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”***.

Dalam rangka mewujudkan target kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 **Prioritas** nya adalah :

- 1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
- 2) Penguatan UMKM;
- 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
- 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2021, dilakukan dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Dengan rangkaian kebijakan:

- a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan *modern* ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
- b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);
- c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *smart economy*;
- d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;

- e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).
- 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan:
- a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- a) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
 - (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olah raga; panti sosial, fasilitas keagamaan).

Pada 2021, sesuai dengan Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, karena di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 Program/Proyek dalam Perpres Tersebut, yaitu :

- a. Revitalisasi Pasar Kwadungan : berada di Desa Kwadungan Kec. Kerjo, merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Dilakukan dalam rangkan pengembangan wilayah utara Kabupaten Karanganyar.
- b. Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan : berada di wilayah perkotaan, di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, menjadi penambahan sarana prasarana olah raga dan rekreasi di wilayah tengah.
- c. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis): berada di wilayah timur Kabupaten Karanganyar, dimana wilayah tersebut berkembang pesat obyek-

obyek wisata baru, yang dikelola oleh desa dan atau masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya akan memerlukan kegiatan pendukung diantaranya : penyediaan lokasi untuk pasar darurat; pengadaan sarana latihan olah raga; penyediaan sarpras perkemahan, penataan kawasan kawasan STA dll. Kegiatan – kegiatan pendukung ini juga menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021, sehingga terjadi kesinambungan antara kegiatan pusat dengan kegiatan daerah (kabupaten).

4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, DPRD Kabupaten Karanganyar memberikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari lembaga eksekutif, yaitu :

a. Bidang Pelayanan Masyarakat:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat yang cepat, tepat dan murah. Upayakan pelayanan KTP dan KK dapat didelegasikan kepada Desa/Kelurahan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih optimal dalam memberikan pelayanan selain KTP dan KK.
- 2) Karanganyar 2021 harus sudah mulai melangkah untuk mengadopsi konsep *smart city*. Di era modern sekarang ini, sudah selayaknya Karanganyar menjadi kota pintar atau *smart city*, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu, dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara dan evaluasi kinerja baik PNS maupun Non PNS di Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan BUMD untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan visi misi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perlu meningkatkan kapasitas, evaluasi kinerja dan kualitas SDM Pegawai di Sekretariat DPRD sebagai pilar penyangga peran dan fungsi DPRD Kabupaten Karanganyar.
- 4) Perlunya pelatihan khusus kepada kepala desa dan perangkatnya agar sumber daya manusianya lebih baik dalam mengelola dana desa dan memberikan pelayanan kepada warganya.

b. Bidang Pembangunan Infrastruktur menyeluruh:

- 1) Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten dengan wilayah-wilayah yang sangat dinamis termasuk daerah yang sangat rawan terhadap bencana, untuk itu pemerintah kabupaten karanganyar harus memperhatikan infrastruktur dan perencanaan pembangunan wilayah yang rawan terjadi bencana/tanah longsor.
- 2) Infrastruktur perhubungan hendaknya memprioritaskan pembangunan pekerjaan lanjutan, baik jalan maupun jembatan dalam rangka percepatan pembangunan, hendaknya tidak semua jalan menggunakan konstruksi rigid beton untuk wilayah-wilayah yang struktur tanahnya kuat, melainkan cukup dibangun dengan hotmix. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memberikan anggaran pemeliharaan jalan yang lebih dari tahun sebelum-sebelumnya, dengan cara ini diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang di Karanganyar.
- 3) Pemerintah Daerah harus terus mengawal pelaku atau pengembang perumahan yang saat ini tidak memperhatikan aspek lingkungan kemasyarakatan, seperti arena permainan anak, mushola hingga pembuatan drainase di lingkungan perumahan yang jauh dari standar sehingga kerap kali menimbulkan banjir.
- 4) Perbanyak juga peningkatan status jalan antar desa menjadi jalan kabupaten dan perhatian infrastruktur di kawasan wisata untuk keselamatan wisatawan dan masyarakat.
- 5) Pengembangan wilayah Karanganyar bagian barat yang berbatasan langsung dengan Kota Solo. Ruas jalan untuk akses pintu tol di Klodran Colomadu dan Gondangrejo, ruas jalan Solo-Purwodadi yang sekarang sangat ramai, agar selalu diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk diperlebar menjadi 2 (dua) jalur, sehingga lalu lintas dapat lancar, apalagi saat ini sudah periode kedua masa jabatan Presiden RI, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Karanganyar, sehingga sudah sangat pas untuk menunjukkan program yang sangat diinginkan dan telah ditunggu-tunggu masyarakat. Jadikan dan upayakan Colomadu dan Gondangrejo, segera bisa bersaing keindahannya dengan Kota Solo dan Solo Baru.
- 6) Alokasi Dana untuk Kelurahan agar disetarakan dengan Desa. Pembangunan di 15 (lima belas) kelurahan yaitu 12 Kelurahan di Kecamatan Karanganyar dan 3 Kelurahan di Kecamatan Tawangmangu jauh tertinggal dibanding dengan desa-desa di Kabupaten Karanganyar, dikarenakan alokasi dana yang sangat kecil. Untuk itu dalam APBD 2021 agar dialokasikan minimal setara dengan Dana Desa, minimal 1,5 Milyard tiap kelurahan.

- 7) Pembangunan infrastruktur menuju tempat wisata agar diperlebar dan diperbaiki sebaik mungkin, sehingga dapat menimbulkan *multiplayer effect ekonomi* bagi masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Rakyat, Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat :

- 1) Penataan dan pendataan kembali data masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan PKH. DPRD meminta Bupati segera menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang supaya nanti penerima bantuan PKH adalah benar-benar masyarakat yang layak untuk menerima.
- 2) Angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar berkisar 9,8%, artinya untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya bantuan rehap rumah masyarakat tidak mampu, masih sangat dibutuhkan. Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) harus terus ditingkatkan, karena faktanya masih banyak warga kita yang rumahnya tidak layak untuk ditempati, mohon Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dinas terkait untuk melakukan pendataan warga kurang mampu agar program RTLH tepat sasaran.
- 3) OPD yang berhubungan dengan masyarakat miskin agar diberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, ketrampilan dan usaha serta memberikan alat-alat usahanya.
- 4) Pengembangan komoditas pangan lokal, perlu diinformasikan pada masyarakat khususnya petani, tentang potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan didaerah-daerah tertentu, sehingga komoditas lokal dapat berkembang dengan adanya kerjasama antar dinas dan kelompok tani. Demikian juga jenis-jenis ternak yang dikembangkan didaerah masing-masing.
- 5) Dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan, perlu disiapkan SDM yang memadai. Dibidang pertanian dan perkebunan maka dinas terkait perlu kiranya menambahkan program kegiatan khusus tentang pengembangan kelompok tani yang sudah terdaftar sehingga program bantuan yang akan didapatkan akan benar-benar bermanfaat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perkebunan. Perlu juga diadakan sosialisasi tentang pengajuan legalitas kelompok tani dan kelompok ternak agar kelompok tani dapat benar-benar mendapatkan akses program pertanian perkebunan dan peternakan di Kabupaten Karanganyar.

d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan :

- 1) Pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya, perilaku mulia/budi pekerti dalam mengimplementasikan budaya Jawa.

- 2) Pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), sehingga perlu adanya bantuan kesejahteraan bagi guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Karanganyar.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di sekolah.
- 4) Pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- 5) Mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan.
- 6) Meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan (life skill).
- 7) Mengembangkan pariwisata pendidikan
- 8) Pembangunan kesehatan hendaknya juga menjadi prioritas termasuk pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih maksimal, sehingga Indonesia siap menghadapi virus yang mewabah atau penyakit endemic lainnya, seperti saat ini adanya Corona Virus Covid-19. Jika perlu, gunakan tempat khusus untuk penanganan pasien COVID-19, supaya tidak berdekatan dengan pasien lainnya.
- 9) Penyelesaian keikutsertaan masyarakat miskin dalam program BPJS JKN, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Dinas Sosial saya harapkan untuk mendata ulang warga yang sebenarnya layak mendapat BPJS JKN yang dibiayai pemerintah.

e. Bidang Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan :

- 1) Untuk pemberdayaan desa, kami mendorong agar Bantuan Keuangan Desa dinaikkan dengan program yang lebih jelas dan tingkat pengawasan yang selektif. Untuk desa-desa yang berprestasi dalam membayar PBB dan mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dengan baik, agar diberikan Reward oleh Pemkab Karanganyar.
- 2) Pengembangan potensi desa/daerah di bidang pariwisata untuk kesejahteraan rakyat, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan prioritas pertanian, perikanan dan peternakan menuju agropolitan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus merespon cepat program Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan 1000 (seribu) desa wisata. Mohon untuk didorong, dikoordinir dan difasilitasi desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata tersebut.
- 4) Dalam pengembangan komoditas pangan lokal, perlu diinformasikan pada masyarakat khususnya petani, tentang potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan didaerah-daerah tertentu, sehingga komoditas lokal dapat berkembang dengan adanya kerjasama antar dinas dan kelompok tani.

Demikian juga jenis-jenis ternak yang dikembangkan didaerah masing-masing.

- 5) BUMDes di tiap-tiap desa perlu didorong agar dapat berkembang dan menjadi ikon baru Karanganyar untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian dan pengembangan pariwisata di wilayah Karanganyar.

f. Bidang Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga :

- 1) Membuat program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas keagamaan, sehingga seluruh masyarakat Karanganyar dapat guyub rukun dan hidup tenteram dengan sesama warga lainnya tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.
- 2) Perlu adanya program nyata dalam penanggulangan kenakalan remaja dan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Karanganyar.
- 3) Membuat program untuk memfasilitasi kreatifitas kegiatan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya jawa, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat untuk semua usia dari muda-mudi sampai usia lanjut, melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi kreatif, dan seni kebudayaan berbasis kampung/desa.
- 4) Program peningkatan ruang publik dan taman bagi aktualisasi pemuda remaja baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya.
- 5) Penghargaan yang sepadan terhadap pemuda, pelajar, mahasiswa berprestasi, atlet maupun mantan atlet.
- 6) Peningkatan program pelatihan dan ketrampilan bagi pemuda sebagai bekal menjadi tenaga kerja agar dapat bersaing di era global.

Adanya Pademi Virus Corona-19 pada tahun 2020, jelas akan berdampak pada tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pademi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa hal tersebut diatas juga menjadi perhatian dan masukan dari peserta. Memperhatikan hasil Musrenbangkab dan kondisi global, nasional dan regional terkait Pademi Virus Corona-19 tahun ini, maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas:

- 1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial : penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial

- 2) Pemulihan ekonomi daerah : pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban / masyarakat terdampak covid-19; (korban PHK, PKL, UKM dll); pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar (*channeling*);

Pandemic Covid yang melanda hampir diseluruh dunia akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pencapaian indikator makro daerah. Pada tahun 2020 sebagian besar penganggaran difokuskan pada penanganan Covid 19. Pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan di tahun 2020 triwulan I, peningkatan inflasi dan peningkatan pengangguran. Kondisi ini akan berdampak pada pencapaian indikator makro di tahun 2021.

4.4. Sasaran Makro Pembangunan Karanganyar Tahun 2021

Beberapa indikator sasaran makro pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 adalah :

Tabel 4.2.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian RPJMD 2021	Target RKPD 2021	Urusan
1	2	3		4
1. Rasio konektivitas	rasio	30,33	30,33	
1) Penurunan Angka Kecelakaan	%	12	12	Perhubungan
2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,02	62,49	Lingkungan Hidup
3) Persentase kawasan kumuh	%	6	6	PKP
4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	0,06	0,06	KKUPM
2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi	%	5,9	2-3	Statistik
3. Tingkat inflasi	%	3,5±1	3,5±1	Statistik
4. PDRB Perkapita (Rp.000)	Rp.000	28.556	≥28.556	Statistik
5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam	%	15,01	15,01	Pertanian
6) Skor Pola Pangan harapan	Score	89	89	Pangan
7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,1	5,1	Pariwisata
8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,56	11,56	Perdagangan
9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	47,14	47,14	Perindustrian
10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,8	1,8	Penanaman Modal, Koperasi UMKM
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68	5-6	Tenaga Kerja
11) TPAK	%	71,44	71,44	Tenaga Kerja
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,84	75,84	Perencanaan
12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,74	13,74	Pendidikan
13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,7	8,7	Pendidikan
14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,82	77,82	Kesehatan
7. Indeks Desa Membangun (IDM)	indek	0,6446	0,6446	Permasdes
15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,648	0,648	Permasdes
16) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,598	0,598	Permasdes

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian RPJMD 2021	Target RKPD 2021	Urusan
1	2	3		4
17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,688	0,688	Pemasdes
8. Nilai Kabupaten Peduli HAM	nilai	79,41	79,41	Administrasi Pemerintahan
18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	130	130	KKUPM
19) Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	88	88	KKUPM
20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (%) (tidak ada kasus)	%	0	0	KKUPM
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	79	79	Kebudayaan
21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	88,5	88,5	Kebudayaan
22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,45	13,45	Kebudayaan
10. Indeks Pembangunan Pemuda	%	0,65	0,65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional / nasional / internasional	Unit	30	30	Pemuda dan Olahraga
24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional	Unit	30	30	Pemuda dan Olahraga
11. Angka kemiskinan	%	6,87-7,78	8,92-9,55	Perencanaan
25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	13,35	≥13,35	Perencanaan
26) Persentase Penanganan PMKS	%	2,00	2,00	Sosial
12. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	indeks	97,25	97,25	PP dan PA
27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,71	74,71	PP dan PA
28) Kabupaten Layak Anak	Score	762	762	PP dan PA
13. Indeks Reformasi Birokrasi		70	70	Administrasi Pemerintahan
29) Indeks SPBE	Indeks	2,69	2,69	Kominfo
30) Nilai SAKIP	nilai	70	70	Administrasi Pemerintahan
31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	Keuangan
32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	82,67	82,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
33) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD)	%	80,43	80,43	Administrasi Pemerintahan
34) Maturitas SPIP	Level	3	3	Pengawasan
35) Indeks Arsip	Indeks	81	81	Kearsipan

Sumber : Baperlitbang, 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karanganyar diterjemahkan/dirinci menjadi dua urusan yaitu Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kumpulan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2021. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka dilakukan mapping program untuk setiap urusan, sebagaimana Tabel berikut. Dalam Matriks tersebut bukan merupakan persandingan antar program, dimana Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**. Program – program tersebut akan dirinci sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran RKPD 2021.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Pendidikan,

Memperhatikan capaian indikator urusan pendidikan tahun 2019 urusan pendidikan, program 2021 diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.1.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	637.552.949.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.339.954.000
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	285.000.000
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	75.000.000
5. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0
JUMLAH	788.252.903.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

b. Kesehatan,

Urusan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.2.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	264.703.099.000
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.188.696.900

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.008.050.300
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	449.125.800
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.452.000
JUMLAH	342.549.424.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik), Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.3.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.730.380.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.323.742.000
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.076.314.000
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.939.300.800
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0
7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.500.000.000
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	69.150.000.000
9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	145.000.000
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	23.491.239.000
11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	225.000.000
12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.400.000.000
JUMLAH	151.980.975.800

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemakaman. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.4.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	2.418.463.000
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.000.000
JUMLAH	4.193.463.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.5.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.509.982.000
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Satpol)	9.040.326.000
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Satpol)	760.000.000
4. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)	2.814.600.000
JUMLAH	22.124.908.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

f. Sosial.

Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan ketrampilan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.6.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.157.030.000
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	422.200.000
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.888.851.000
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	686.924.500
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	12.575.500
JUMLAH	9.167.581.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel-tabel berikut.

a. Tenaga Kerja

Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.7.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	385.000.000
2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	695.000.000
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100.000.000
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100.000.000
JUMLAH	1.280.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT. Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.8.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.079.083.000
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	45.000.000
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	376.140.000
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	45.000.000
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.000.000
JUMLAH	4.590.223.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

c. Pangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.9.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	500.000.000
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	250.000.000
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.000.000
4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.000.000
JUMLAH	788.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

d. Pertanahan

Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.10.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0
2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0
3. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	0
4. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000
JUMLAH	300.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

e. Lingkungan Hidup

Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.11.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.940.576.000
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	525.000.000
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000
4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	59.436.200
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	154.000.000
6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.423.300
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	24.426.700
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.417.999.000
JUMLAH	14.484.861.200

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.12.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.632.313.000
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.067.097.000
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	95.000.000
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	108.460.000
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18.000.000
JUMLAH	8.920.870.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.13.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.802.746.000
2. PROGRAM PENATAAN DESA	190.000.000
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100.000.000
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.560.000.000
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.815.000.000
JUMLAH	14.467.746.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.14.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	450.000.000
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.488.060.000
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	470.000.000
JUMLAH	7.568.060.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

i. Perhubungan

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, penunjuk dan perlindungan pengguna jalan (kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.15.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.550.747.250
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.270.320.000
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
JUMLAH	11.821.067.250

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

j. Komunikasi dan Informatika

Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi publik yang up todate, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.16.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.240.042.000
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.194.760.000
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.845.000.000
JUMLAH	9.279.802.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.17.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35.000.000
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	75.000.000
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	450.000.000
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	45.000.000
7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
JUMLAH	635.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

1. Penanaman Modal

Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan), meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.18.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.664.124.000
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	160.000.000
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	150.000.000
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	305.000.000
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.462.000
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000
JUMLAH	12.701.586.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

m. Kepemudaan dan Olahraga

Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras olah raga, prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.19.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	330.000.000
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	990.000.000
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
JUMLAH	1.320.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

n. Statistik

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara uptodate dan terbuka (on line). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.20.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	31.000.000
JUMLAH	31.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

o. Persandian

Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.21.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000
JUMLAH	50.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

p. Kebudayaan

Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dll). Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.22.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	535.000.000
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	200.000.000
3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0
4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	115.000.000
5. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0
JUMLAH	850.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

q. Perpustakaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.23.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.086.683.000
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	164.800.000
2. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0
JUMLAH	7.251.483.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

r. Kearsipan.

Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.24.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	149.853.000
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.000.000
3. PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	0
JUMLAH	169.853.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut.

a. Kelautan dan Perikanan

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.25.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.000.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.030.950.000
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000
JUMLAH	1.070.950.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

b. Pariwisata

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.26.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.455.799.000
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.397.577.000
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	220.000.000
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20.000.000
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	110.000.000
JUMLAH	9.203.376.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

c. Pertanian

Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan dan ternak) , mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil pertanian, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.27.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.093.093.000
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.344.500.000
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.595.000.000
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.000.000
6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	295.000.000
JUMLAH	39.452.593.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

d. Kehutanan

Urusan kehutanan tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel V.28.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
Tidak ada kewenangan	

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel V.29.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
Tidak ada kewenangan	

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

f. Perdagangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas pasar rakyat, penyediaan sarana prasarana pasar rakyat yang memenuhi standar, meningkatkan potensi ekspor produk lokal, terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.30.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.394.118.000
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.000.000
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.350.000.000
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	70.000.000
6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	50.000.000
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0
JUMLAH	17.979.118.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

g. Perindustrian

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah, penyediaan lapangan kerja baru, penataan

peraturan daerah terkait investasi, serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif dan ramah investasi. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.31.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	620.000.000
2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	0
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0
JUMLAH	620.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

h. Transmigrasi

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dan penyediaan bantuan bagi transmigran asal Karanganyar. Dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel V.32.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000
JUMLAH	10.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih.

Tabel V.33.

Program dan Perkiraan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.063.252.000
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.317.500.000
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.155.000.000
4. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	0
JUMLAH	36.535.752.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

b. Sekretariat DPRD

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat daerah.

Tabel V.34.

Program dan Perkiraan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.720.356.600
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.307.649.150
JUMLAH	44.028.005.750

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut :

a. Perencanaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, sikron dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.35.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.147.278.000
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	819.640.000
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.226.000.000
JUMLAH	9.192.918.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

b. Keuangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.36.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.099.781.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	391.468.496.000
2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.173.546.000
3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.266.750.000
JUMLAH	452.008.573.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

c. Kepegawaian

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penataan, pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.37.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.850.167.000
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.158.850.000
JUMLAH	21.009.017.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

d. Pendidikan dan Pelatihan

Diprioritaskan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya pegawai, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.38.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.232.428.000
JUMLAH	1.232.428.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

e. Penelitian dan Pengembangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.39.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	105.000.000
JUMLAH	105.000.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih.

Dengan program prioritas sebagai berikut:

Tabel V.40.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2021

Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.831.321.000
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.124.000.000
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	313.000.000
JUMLAH	12.268.321.000

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

5.1.7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih

Tabel V.41.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kewilayahan Tahun 2021

PERANGKAT DAERAH	Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. Kecamatan Jatipuro	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.124.481.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.330.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.500.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000
2. Kecamatan Jatiyoso	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.940.812.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.500.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.000.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.300.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.000.000
3. Kecamatan Jumantono	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.602.466.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.120.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000
4. Kecamatan Jumapolo	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.200.147.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.700.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.600.000
5. Kecamatan Matesih	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.117.491.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0

PERANGKAT DAERAH	Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.000.000
6. Kecamatan Tawangmangu	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.641.636.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.412.200.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	385.000.000
7. Kecamatan Ngargoyoso	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.078.600
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.499.800
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.931.800
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.200.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.433.500
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.706.300
8. Kecamatan Karangpandan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.081.427.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000
9. Kecamatan Karanganyar	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.112.654.950
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.310.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.689.476.100
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	313.895.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.793.021.950
10. Kecamatan Tasikmadu	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.302.018.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.400.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.000.000
11. Kecamatan Jaten	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.497.771.200
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.012.800

PERANGKAT DAERAH	Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.719.200
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.075.900
12. Kecamatan Colomadu	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.913.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.600.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.000.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.500.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.000
13. Kecamatan Gondangrejo	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.922.633.564
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.105.436
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.200.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.884.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.792.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.651.000
14. Kecamatan Mojogedang	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.209.688.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.400.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.500.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.500.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.855.000
15. Kecamatan Kebakkramat	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.147.464.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.180.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.200.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.200.000
16. Kecamatan Kerjo	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.468.99.000
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.142.200
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.002.200
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.400.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.059.900
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.706.700
17. Kecamatan Jenawi	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.232.669.000

PERANGKAT DAERAH	Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.478.100
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.103.700
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.374.200
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.227.800
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.382.200
	JUMLAH	72.971.964.000

Sumber : Bapertitbang 2020, diolah

5.1.8. Unsur Pemerintahan

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Diprioritaskan untuk menciptakan kondiusifitas wilayah yang aman, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih

Tabel V.42.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Program Sesuai Permendagri 90/2019	Perkiraan Pendanaan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.619.273.880
2. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	385.000.000
3. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.520.000.000
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.865.000.000
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.287.000.000
6. PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	600.000.000
JUMLAH	13.276.273.880

5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2021

Memperhatikan hasil perhitungan kemampuan pendanaan Tahun 2021 pada Bab III sebesar Rp. 2.116.708.785.000. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan, yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Tahun 2021. Dana tersebut harus dikurangi untuk belanja wajib yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah) sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.43.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	URAIAN	Jumlah
1	PENDAPATAN	2.135.743.095.880
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	50.000.000.000

No	URAIAN	Jumlah
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	Total Kemampuan Pendanaan 2021	2.185.743.095.880
	Dikurangi	997.758.026.250
1.	Gaji Pegawai	957.758.026.250
2.	Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Pinjaman	30.000.000.000
3.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	10.000.000.000
	Kapasitas Riil	1.187.985.069.630

Sumber : Baperlitbang 2020, diolah

Dari total kapasitas riil sebesar **Rp. 1.187.985.069.630,-** wajib dibelanjakan untuk belanja lainnya seperti :

- 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021;
- 2) Kegiatan Bagi Hasil Pajak Retribusi Desa (10%);
- 3) Kegiatan Alokasi Dana Desa;
- 4) Kegiatan Dana Desa (10%) dana Perimbangan tidak termasuk DAK;
- 5) Kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas (JKN);
- 6) Kegiatan Dana Kelurahan (sebesar minimal sama dengan ADD terkecil kali 12 kelurahan), dll.

Membandingkan kapasitas riil kemampuan dana dan usulan program kegiatan Perangkat Daerah, sehingga diperoleh program kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai kemampuan pendanaan Tahun 2021. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 serta pendanaannya sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. **Indikator Kinerja** adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya. Indikator kinerja utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu disusun, di antaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar disusun untuk memberikan pedoman atau panduan pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai oleh instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dicapai.

Adapun matrik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021 sebagaimana Tabel VI.1 dan Tabel VI.2

Tabel VI.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1	2	3	4	5
1.1.	Mewujudkan kualitas pembangunan infra struktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Rasio konektivitas	rasio	30,33
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,49
1.1.1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1) Penurunan Angka Kecelakaan	rasio	12
1.1.2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,49
		3) Persentase kawasan kumuh	%	6
1.1.3.	Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana	4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	0,06
2.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	%	2-3
		Tingkat inflasi	%	3,5-3
		PDRB Perkapita	Ribu/th/org	28.556
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68
2.1.1.	Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian dan perikanan	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	15,01
		6) Skor Pola Pangan harapan	Skor	89
2.1.2.	Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	5,1
2.1.3.	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	11,56
2.1.4.	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	47,14
2.1.5.	Meningkatnya nilai investasi daerah	10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	1,80
2.1.6.	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11) TPAK	%	71,44
3.1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,84
3.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	12) Harapan lama Sekolah	Tahun	13,74
		13) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,70
3.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	14) Usia harapan Hidup	Tahun	77,82
4.1	Terwujudnya pemerataan antar desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indek	0,6446
4.1.1.	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	15) Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,648
		16) Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,598
		17) Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,688
5.1	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender	Nilai Kabupaten Peduli HAM	Nilai	79,41
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	79
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Jumlah	30
		Angka kemiskinan	%	8,92-9,55
5.1.1.	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	130
		19) Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda	%	88
		20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	0
5.1.2.	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	88,5

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1	2	3	4	5
		22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	13,45
5.1.3.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Unit	20
		24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional/ internasional	Unit	30
5.1.4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	25) Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	13,35
		26) Persentase Penanganan PMKS	%	2,00
5.1.5.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,71
		28) Kabupaten Layak Anak	Skor	762
5.2	Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
5.2.1.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	29) Indeks SPBE	Indeks	2,69
		30) Nilai SAKIP	nilai	70
		31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
		32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	82,67
		33) IKM Kabupaten	%	80,43
		34) Maturitas SPIP	Level	3
		35) Indeks Arsip	Indeks	81

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:

1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
2. Fokus kesejahteraan sosial analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja,
3. Fokus seni budaya dan olahraga analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

II. Aspek pelayanan umum terdiri dari:

1. Fokus layanan urusan pemerintahan wajib analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.
 2. Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah.
- III. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama :
1. Fokus kemampuan ekonomi daerah analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.
 2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur.
 3. Fokus iklim berinvestasi analisis kinerja atas iklim berinvestasi.

Sedangkan Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel VI.2.

Terkait target capaian indikator tersebut, jika memperhatikan kondisi global, nasional dan regional di tahun 2020, diperkirakan ada beberapa indikator yang tidak tercapai. Terutamanya indikator kinerja yang terdampak langsung oleh adanya pandemi virus corona-19 (Covid-19) seperti misalnya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kondisi infrastruktur, nilai investasi, pendapatan perkapita dan lainnya. Perubahan target capaian indikator kinerja akan dilakukan perbaikan dan atau perubahan pada saat penyusunan RKPD Perubahan 2021, setelah memperhatikan hasil evaluasi di tahun 2020 dan perkembangan keadaan pada semester I Tahun 2021.

Tabel VI.2.
Penetapan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,52	Baperlitbang
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	13,74	Disdikbud
3.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,7	Disdikbud
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,32	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,9	Baperlitbang
6.	PDRB per kapita	Juta/th/ org	28.556	Baperlitbang
7.	Angka kemiskinan	%	8,51-8,92	Baperlitbang
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90-3,10	Baperlitbang
9.	PDRB ADHK	Rp. 000	29.465.952	Baperlitbang
10.	PDRB ADHB	Rp. 000	39.380.396	Baperlitbang
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar			
B.1.1	Pendidikan			
1.	Persentase Pemenuhan sarana prasarana PNF	%	100	Disdikbud
2.	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	%	88	Disdikbud
3.	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%	88	Disdikbud
4.	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan	%	82	Disdikbud
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	Disdikbud
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100	Disdikbud
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,85	Disdikbud
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	75	Disdikbud
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	Disdikbud
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	Disdikbud
7.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	79,5	Disdikbud
8.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	81	Disdikbud
B.1.2	Kesehatan			
1.	Cakupan Fasilitas pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	35	Dinkes
2.	Nilai IKS Kabupaten	%	0,6	Dinkes
3.	Cakupan Ibu resiko tinggi kebidanan yang ditangani	%	100	Dinkes
4.	Persentase komplikasi kebidanan	%	93	Dinkes
5.	Angka kesakitan bayi	%	67	Dinkes
6.	Angka kesakitan lansia	%	47	Dinkes
7.	Angka kesakitan anak balita	%	47	Dinkes
8.	Persentase kadarzi	%	85	Dinkes
9.	Persentase stunting	%	<22	Dinkes
10.	Persentase Desa STBM	%	57	Dinkes
11.	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	90	Dinkes
12.	Persentase Desa siaga aktif mandiri	desa	30	Dinkes
13.	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	40	Dinkes
14.	Prevalensi HIV	<0,5 per 1000 pddk	<1	Dinkes
15.	Persentase Success rate (SR) TBC	%	90	Dinkes
16.	AFP Rate	3,5 per 100.000 pddk	>= 2	Dinkes
17.	Discarded Campak	2,33 per 100.000 pddk	>= 2	Dinkes
B.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	75	DPUPR
2.	Persentase panjang talud dalam kondisi baik	%	45	DPUPR
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75	DPUPR
4.	Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah	%	86	DPUPR
5.	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	82	DPUPR
6.	Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	45	DPUPR
B.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
1.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	9	DPUPR
2.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	862	DPUPR
3.	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	%	7	DPUPR
B.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
2.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	BPBD
1.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	BPBD
2.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	93	BPBD
3.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	55	Bakesbangpol
4.	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%	55	Bakesbangpol
5.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan berdemokrasi	%	55	Bakesbangpol
6.	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakkan perda	%	83	Satpol PP
7.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	100	Satpol PP
8.	Rasio Linmas terhadap jumlah penduduk	rasio	4	Satpol PP
9.	Rasio WMK terhadap luas wilayah	rasio	1	Satpol PP
	Jumlah Sattakar (Satuan relawan kebakaran / Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk	Angka	40	Satpol PP
B.1.6	Sosial			
1.	Persentase KK Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Dinsos
2.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinsos
3.	Meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	Dinsos
4.	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinsos
5.	Persentase pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial, panti asuhan, organisasi sosial	%	100	Dinsos
6.	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	100	Dinsos
7.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinsos
8.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	96,88	Dinsos
9.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	%	100	BPBD
B.ii	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
B.ii.1	Tenaga Kerja			
1.	Persentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	80,46	Disdagnakerkop UKM
2.	Persentase Calon tenaga kerja yang diterima kerja	%	86,63	Disdagnakerkop UKM
3.	Persentase perselisihan hubungan industrial mediasi	%	100	Disdagnakerkop UKM
B.ii.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10	DP3APPKB
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	9	DP3APPKB
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Per 100.000 org	8,22	DP3APPKB
B.ii.3	Pangan			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
1.	Ketersediaan pangan utama	ton	529.440,69	DISPERTAN
2.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/org	1.907	DISPERTAN
3.	Ketersediaan protein perkapita	%	59	DISPERTAN
B.II.4 Pertanian				
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	7	SETDA
B.II.5 Lingkungan Hidup				
1.	Persentase penanganan sampah	%	71	DLH
2.	Persentase cakupan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan	%	35,44	DLH
3.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	parameter	18	DLH
4.	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	85	DLH
5.	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	80	DLH
B.II.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	77,50	Disdukcapil
2.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	82	Disdukcapil
3.	Cakupan penerbitan KTP elektronik	%	96,5	Disdukcapil
4.	Cakupan penerbitan Akte kelahiran penduduk usia anak	%	93	Disdukcapil
5.	Cakupan penerbitan Akte Kematian	%	60	Disdukcapil
6.	Cakupan penerbitan KIA	%	22,5	Disdukcapil
7.	Cakupan penerbitan Validasi Data base penduduk	%	89	Disdukcapil
B.II.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1.	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	Dispermas des
2.	Persentase Desa dan Kelurahan dalam kategori berkembang	%	3	Dispermas des
3.	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat (LEM) aktif	%	64	Dispermas des
4.	Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	80	Dispermas des
5.	Tingkat pembentukan kawasan perdesaan	%	40	Dispermas des
6.	Persentase keswadayaan masyarakat untuk pembangunan tingkat desa	%	11	Dispermas des
B.II.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera				
1.	Persentase peningkatan peserta KB MKJP	%	7,5	DP3APPKB
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	75,25	DP3APPKB
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera)	%	20,64	DP3APPKB
B.II.9 Perhubungan				
1.	Persentase terminal Tipe C sesuai standar	%	30	Dishub
2.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	77	Dishub
3.	Persentase capaian PAD dari parkir tepi jalan kab	%	148	Dishub
4.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	angka	2.100.000	Dishub
5.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	64	Dishub
6.	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	2	Dishub
B.II.10 Komunikasi dan Informatika				
1.	Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78,6	Diskominfo
2.	Persentase website perangkat daerah yang terupdate	%	85,71	Diskominfo
3.	Persentase KIM Aktif	%	76,47	Diskominfo
4.	Persentase Media Massa yang bekerjasama dengan Diskominfo Pemkab	%	60	Diskominfo
5.	Persentase Layanan Pemerintah yang berbasis elektronik	%	60	Diskominfo
6.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	40	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
B.II.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1.	Persentase Koperasi Aktif	%		Disdagnakerkop UKM
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	unit	18.044	Disdagnakerkop UKM
B.II.12	Penanaman Modal			
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	12	DPMPPTSP
2.	Nilai investasi	Rp. (trilyun)	23,163	DPMPPTSP
3.	Persentase pelayanan perijinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	DPMPPTSP
4.	Persentase pelayanan perijinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	DPMPPTSP
5.	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	%	9,47	
B.II.13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1.	Persentase Meningkatnya Prestasi Pemuda	%	60	Disparpora
2.	Persentase cabang Olah Raga Yang Terbina	%	60	Disparpora
3.	Persentase Sarana Olah Raga Yang Memadai	%	60	Disparpora
B.II.14	Statistik			
1.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	%	87,5	Diskominfo
B.II.15	Persandian			
1.	Persentase perangkat daerah yang sudah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	25	Diskominfo
B.II.16	Kebudayaan			
1.	Persentase pelestarian seni dan budaya	%	86	Disdikbud
2.	Persentase pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	%	83	Disdikbud
3.	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	79	Disdikbud
4.	Persentase kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	%	83	Disdikbud
B.II.17	Perpustakaan			
1.	Persentase perpustakaan aktif	%	100	Disarpus
2.	Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	Disarpus
3.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	Disarpus
4.	Persentase sarana prasarana perpustakaan sesuai standar	%	100	Disarpus
B.II.18	Kearsipan			
1.	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara	%	100	Disarpus
2.	Cakupan arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	100	Disarpus
B.III	Layanan Urusan Pilihan			
B.III.1	Kelautan dan Perikanan			
1.	Produksi Benih Ikan	Ekor	40.369.012	Disperten
2.	Persentase produksi perikanan yang dipromosikan	%	75	Disperten
3.	Persentase pembudidaya yang dibina	%	45	Disperten
4.	Cakupan perairan umum yang direstocking	%	15	Disperten
5.	Angka Kesakitan ternak besar	%	10	Disperten
6.	Angka Kesakitan ternak kecil	%	18,40	Disperten
7.	Angka Kesakitan Unggas	%	19	Disperten
8.	Angka Kesakitan Aneka Ternak	%	19	Disperten
9.	Persentase produksi peternakan ASUH	%	93,50	Disperten
10.	Cakupan kelompok peternak yang dibina	%	80	Disperten
11.	Cakupan pengusaha ternak yang dibina	%	75	Disperten
12.	Ketersediaan bibit ternak besar	dosis	12.000	Disperten
B.III.2	Pariwisata			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
1.	Peresentase kenaikan Kunjungan wisatawan	%	80	Disparpora
2.	Peresentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	80	Disparpora
3.	Peresentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	80	Disparpora
B.III.3	Pertanian			
1.	Produksi tanaman pangan			Dispartan
	• Padi	ton	343.244	
	• Jagung	ton	22.398	
	• Kedelai	ton	1.634	
	• Kacang tanah	ton	2.204	
	• Ubi kayu	ton	77.100	
	• Ubi Jalar	ton	29.230	
	• Bawang putih	ton	17.287	
	• Cabai besar	ton	28.054	
	• Cabai rawit	ton	8.721	
2.	Produksi tanaman perkebunan			Dispartan
	• Kopi	ton	6,929	
	• Cengkeh	ton	121,327	
	• Kakao	ton	24,115	
	• Kelapa Dalam	ton	1.042,949	
	• Tembakau	ton	614,077	
	• Tebu	ton	5.181,410	
3.	Persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan	%	100	Dispartan
4.	Persentase lahan pertanian terdampak bencana yang ditangani	%	100	Dispartan
5.	Persentase UPJA berkembang	%	50	Dispartan
6.	Cakupan binaan kelompok tani	%	60	Dispartan
7.	Persentase lembaga keuangan mikro yang berkembang	%	70	Dispartan
8.	Persentase sertifikasi pangan segar	%	5	Dispartan
B.III.4	Kehutanan			
	-	-	-	
B.III.5	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	-	%	-	
B.III.6	Perdagangan			
1.	Persentase Sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	11,11	Disdagnakerkop UKM
2.	Persentase pasar rakyat memenuhi kriteria pasar sehat	%	45,02	Disdagnakerkop UKM
3.	Persentase PKL yang dibina dan ditata	%	37,31	Disdagnakerkop UKM
B.III.7	Perindustrian			
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	60	DPMPSTP
B.III.8	Transmigrasi			
1.	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	Disdagnakerkop UKM
B.IV	Penunjang Urusan			
B.IV.1	Administrasi Pemerintahan			
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	93	Semua OPD
2.	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	%	93	Semua OPD
3.	Cakupan pelayanan peningkatan disiplin aparatur	%	98	Semua OPD
4.	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	98	Semua OPD
5.	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	94	Semua OPD
6.	Cakupan Persentase OPD yang nilai PMPRB-nya	%	70	Setda

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
	baik			
7.	Cakupan Persentase OPD yang nilai SAKIP-nya baik	%	70	Setda
8.	Cakupan Persentase OPD yang nilai IKM-nya baik	%	70	Setda
9.	Indeks Kematangan organisasi daerah	%	34	Setda
10.	Predikat nilai EKPPD	klas	Sangat tinggi	Setda
11.	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	Dispermas des
12.	Cakupan penataan peranturan perundang-undangan dan fasilitasi permasalahan hukum	%	100	Setda
13.	Cakupan koordinasi perekonomian daerah	%	100	Setda
14.	Cakupan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat	%	100	Setda
15.	Cakupan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang pemudaran olah raga	%	100	Setda
16.	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	Setda
17.	Cakupan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Setda
18.	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa	%	100	LPSE
19.	Cakupan pelayanan kedinasan	%	100	Setda
20.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Setda
21.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	Setda
22.	Persentase wilayah tertib perda	%	100	Setda
23.	Persentase sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	Setda
24.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes	%	100	Dispermas des
25.	Persentase kehadiran dalam Musrenbang	%	93	Baperlitbang
26.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	%	100	Setwan
27.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	Setwan
28.	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	Setda
B.IV.2	Pengawasan			
1.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	7	Inspektorat
2.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	20	Inspektorat
3.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	Inspektorat
4.	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	76	Inspektorat
5.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	94	Inspektorat
6.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	Inspektorat
7.	Hasil audit BPK	opini	WTP	Inspektorat
8.	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	48	Inspektorat
9.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	Inspektorat
B.IV.3	Perencanaan Pembangunan			
1.	Capaian program perencanaan pembangunan daerah	%	91,5	Baperlitbang
2.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang ekonomi	%	91,5	Baperlitbang
3.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang sosial budaya	%	91,5	Baperlitbang
4.	Capaian program yang memenuhi target indikator bidang prasarana wilayah	%	91,5	Baperlitbang
5.	Cakupan pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi		100	Baperlitbang
B.IV.4	Keuangan			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target	OPD Pengampu
1	2	3	4	5
1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah (OPD)	%	100	BKD
2.	Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan baik	%	100	BKD
3.	Persentase ketepatan penyusunan anggaran	%	100	BKD
B.IV.5 Kepegawaian				
1.	Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD	%	50	BKPSDM
2.	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	94	BKPSDM
3.	Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat	%	100	BKPSDM
4.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	BKPSDM
B.IV.6 Pendidikan dan Pelatihan				
1.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	48,8	BKPSDM
2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,07	BKPSDM
B.IV.7 Penelitian dan Pengembangan				
1.	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	%	100%	Baperlitbang
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.	Pengeluaran Perkapita	Juta/th/ org	13,35	SETDA
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	SETDA
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,69	SETDA
4.	Angka kriminalitas	%	0,014	Polres
5.	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi	%	1,8	DPMPSTSP
6.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	100	DPUPR
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,02	DLH
8.	Indeks Ketahanan Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai	3,56	BPBD

Sumber : RPJMD dan Renstra OPD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023,

BAB VII PENUTUP

RKPD Tahun 2021 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2021, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2021.

Kaidah pelaksanaan dokumen RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan, termasuk marga masyarakat dan dunia usaha turut berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan atau APBN/BLN semua Perangkat Daerah (PD) harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021;
3. Masyarakat dan dunia usaha (swasta) dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi RKPD Tahun 2021 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 yang memuat prioritas dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

